

**ADAPTIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN KAPASITAS
PEMERINTAH DAERAH DALAM KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN
PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KOTA MAMUJU**

Disusun dan diusulkan oleh:

NURATHIRAH APRILLAH NORMAN

Nomor Stambuk: 10561 05543 15



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

**ADAPTIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN KAPASITAS
PEMERINTAH DAERAH DALAM KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN
PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KOTA MAMUJU**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan Diajukan Oleh :

NURATHIRAH APRILLAH NORMAN

Nomor Stambuk : 10561 05543 15

**PRODI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : ***Adaptive Governance* dalam Pengembangan Kapasitas
Pemerintah daerah dalam Pemberdayaan Pedagang
Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Mamuju**

Nama Mahasiswa : Nurathirah Aprillah Norman

Stambuk : 105610554315

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui :

Pembimbing I



Dr. Andi Rosdianti Razak M.,Si

Pembimbing II



Dr. Hj. Rulinawaty Kasmad, S.Sos M.,Si

Mengetahui,

Dekan

Fisipol Unismuh Makassar


Dr. Hj. Ihvani Malik, S.Sos., Msi,
Ilmu Sosial dan Politik

Ketua Jurusan

Ilmu Administrasi Negara



Nasrul Haq, S.Sos., M.PA

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisip Universitas Muhammadiyah Makassar, dengan Nomor : 0055/FSP/A.4-11/1X/41/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S.I) dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara di Makassar pada hari Senin tanggal 30 September tahun 2019.

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si


Dr. Burhanuddin, S.Sos. M.Si

Penguji :

1. Dr. Andi Rosdianti Razak, M.Si (Ketua)
2. Dr. Abdul Mahsyar, M.Si
3. Dr. Hj. Fatmawati, M.Si
4. Dr. Hafiz Elfiansya, P. M.Si


()


()


()


()

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Nurathirah Aprillah Norman

Nomor Stambuk : 105610554315

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa Skripsi ini dengan Judul “*Adaptive Governance* Dalam Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Mamuju” adalah sepenuhnya merupakan karya sendiri. Tidak ada bagian di dalamnya yang merupakan hasil plagiat dari karya orang lain, tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang ditujukan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian ini.

Makassar, 30 September 2019

Yang Menyatakan,



Nurathirah Aprillah Norman

ABSTRAK

Nurathirah Aprillah Norman, 2019. *Adaptive Governance Dalam Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Mamuju.* Dibimbing oleh Andi Rosdianti Razak dan Rulinawati Kasmad. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *Adaptive Governance* dalam pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Bagaimana *Adaptive Governance* dalam pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) mengukur faktor yang mempengaruhi pengembangan kapasitas pemerintah adaptif di Kabupaten Mamuju.

Tipe Penelitian ini bersifat Deskriptif Kualitatif. Dasar penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif yaitu peneliti bermaksud untuk memberikan gambaran mengenai *Adaptive Governance* dalam pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Mamuju dimana penulis mewawancarai 6 orang, sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan maupun arsip resmi yang dapat didukung dengan kelengkapan data primer.

Hasil penelitian dan keterangan yang diberikan oleh informan dapat ditarik kesimpulan bahwa *Adaptive governance* (Pemerintahan Adaptif) dalam menghasilkan informan terhadap pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam pemberdayaan pedagang kaki lima sudah berjalan dengan baik dilihat dari pernyataan informan walaupun ada sedikit yang perlu dibenahi agar pedagang kaki lima merasa puas dengan hasil kerja pemerintah.

Kata Kunci : *Adaptive governance* dan Pedagang Kaki Lima (PKL)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Adaptive Governance dalam Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Mamuju**”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang penulis ajukan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana di Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Ucapan terimakasih pertama-tama penulis persembahkan untuk kedua orang tua penulis, ibunda tercinta **Rubia** dan ayahanda tercinta **Norman Rasyid** atas dukungan, semangat serta doa-nya yang tidak pernah berhenti diberikan kepada penulis agar selalu diberikan kemudahan dan kelancaran untuk setiap segala urusannya. Terima kasih atas segala perjuangan dan pengorbanannya, semoga Kedua orangtua penulis senantiasa di rahmati oleh Allah SWT. Kepada kekasih Hati Bripda **A.MuhGhalib** yang selalu mengantar dan menemani penulis meneliti dikantor dan memberikan bantuan serta semangat untuk mengalihkan rasa lelah dalam proses penyusunan skripsi ini. Untuk **Yuliani**, saya ucapkan terima kasih karena menemani penulis bimbingan.

Kepada Sudara-saudara kandungku Terima kasih atas semua bentuk penyemangat yang tidak bisa tertebak.

Banyaknya rintangan dan tantangan yang harus penulis hadapi dalam penyelesaian skripsi ini dan menyadari bahwa hal ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang selalu mengarahkan penulis untuk mencapai dan memperoleh kebenaran untuk menyelesaikan skripsi ini. Izinkan penulis untuk memberikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuannya kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini, maka dari itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak **Dr. H. Abd Rahman, SE., M.M** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibunda **Dr. Andi Rosdianti Razak M.,Si** selaku pembimbing I dan Ibunda **Dr. Hj. Rulinawati Kasmad, S.Sos M.,Si** selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Ibunda **Dr. Hj. Ihyani Malik, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Kakanda **Nasrul Haq, S.Sos., M.PA** selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi dan Kakanda **Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP** selaku sekretaris jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Segenap Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah sudi berbagi ilmunya kepada penulis selama ini.

6. Para pihak Dinas/Instansi yang ada pada lingkup Dinas Perdagangan yang telah memberikan izin kepada penulis melakukan penelitian dan Instansi terkait lainnya yang sempat penulis wawancarai dan bersedia meluangkan waktunya untuk penulis.
7. Seluruh teman-teman **Mebes** dan kelas **ADN015H** yang selama ini selalu bersama-sama mengikuti jadwal kuliah yang selalu punya cerita dan pengalamannya tersendiri didalam kelas.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 30 September 2019

Penulis,



Nurathirah Aprillah Norman

DAFTAR ISI

Halaman pengajuan Skripsi.....	i
Halaman persetujuan.....	ii
Halaman penerimaan Tim.....	iii
Halaman pernyataan Keaslian Karya Ilmiah.....	iv
Abstrak.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel.....	xi
Daftar Gambar.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Konsep dan Teori Adaptive Governance.....	10
B. Pengembangan Kapasitas.....	13
C. Pemberdayaan PKL.....	15
D. Penelitian Terdahulu.....	17
E. Kerangka Pikir.....	19
F. Fokus Penelitian.....	20
G. Deskripsi Fokus Penelitian.....	21
BAB III METODE PENELITIAN.....	24
A. Waktu Lokasi Penelitian.....	24
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	24

C. Sumber Data.....	25
D. Informan Penelitian.....	25
E. Teknik Pengumpulan Data.....	27
F. Teknik Analisis Data.....	28
G. Keabsahan Data.....	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	31
1. Gambaran Umum Kabupaten Mamuju	32
2. Kantor Dinas Perdagangan	32
3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	35
B. <i>Adaptive Governance</i> dalam Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Pedagang kaki Lima (PKL) di Kabupaten Mamuju.....	38
1. Pengembangan Sumber Daya Manusia Adaptif.....	40
2. Penguatan Organisasi Adaptif	47
3. Pembaharuan Institusional Adaptif	52
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	56

DAFTAR TABEL

A. Tabel 2.1 Penelitian yang Relevan.....	17
B. Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	26
C. Tabel 4.1 Golongan Kepangkatan Dinas Perdagangan.....	37
D. Tabel 4.2 Status Kepegawaian.....	37
E. Tabel 4.3 Pengembangan Sumber Daya Manusia.....	40
F. Tabel 4.4 Penguatan Organisasi.....	45
G. Tabel 4.5 Pembaharuan Institusional.....	49



DAFTAR GAMBAR

- A. Gambar 2.1 Kerangka pikir.....21
- B. Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan.....35



BAB I

PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Adaptive governance melihat adanya saling ketergantungan terhadap praktek inovasi dalam ilmu pengetahuan kebijakan publik baik dalam perumusan kebijakan untuk mendesain struktur organisasi maupun implementasi kebijakan. *Adaptive governance* atau pemerintahan adaptif juga mengintegrasikan berbagai kajian ilmu pengetahuan dalam kebijakannya untuk memajukan kepentingan bersama dalam konteks tertentu yang ada dalam struktur pembuatan keputusan dengan model terbuka. Tetapi *adaptive governance* masih sulit diwujudkan saat ini karena berbagai kondisi yang terjadi dalam tata kelola pemerintah. Pemerintahan adaptif adalah konsep dari teori kelembagaan yang berkaitan dengan evolusi institusi untuk pengelolaan aset bersama.

Pemerintahan adaptif berkembang untuk menganalisis masalah-masalah sosial, kelembagaan, ekonomi dan ekologi model ini telah berhasil membangun dan menghadapi tantangan yang ditimbulkan dari perubahan global serba cepat. *Adaptive governance* diharapkan agar mempercepat transisi dalam pengelolaan pemerintahan, agar masalah-masalah kompleks yang dihadapi oleh pemerintah saat ini dapat selesai dalam pemberdayaan pedagang kaki lima. *Adaptive governance* diharapkan dapat memberikan perbedaan dalam pemerintahan konvensional.

Adaptive governance berfungsi untuk meningkatkan peran *street level* birokrasi, regulasi dan manajemen lainnya dengan dijalankannya *adaptive governance* dapat merangkul seluruh pola pemerintahan untuk mendefinisikan kembali peran mereka dan memfasilitasi tujuan pemerintah dalam kebijakan sumber daya alam. Oleh karena itu, *adaptive governance* akan merangkul kedalam pola pemerintahan adaptif yang lebih besar dan mendefinisikan kembali peran mereka untuk memfasilitasi dan memajukan kepentingan bersama dalam kebijakan sumber daya alam, memajukan kepentingan bersama, tujuan dan kriteria yang tepat untuk pemerintahan dalam pemberdayaan pedagang kaki lima.

Adaptive governance memiliki kebijakan sumber daya manusia pemerintahan adaptif dan telah memajukan kepentingan bersama dengan cukup baik untuk dipertimbangkan sebagai model “*innovation*”. *Adaptive governance* membuat kerangka kerja agar dapat mengatur dan mengintegrasikan data dalam setiap studi kasus dan juga mengembangkan ilmu pengetahuan pada konsep pemerintahan adaptif melalui perbandingan antar kasus dalam pemberdayaan pedagang kaki lima. Pemerintahan adaptif telah mendapatkan dukungan luas antara para ahli pemerintah yang berpendapat bahwa organisasi harus responsif terhadap masalah dan pengetahuan yang muncul disekitar lingkungan organisasi mereka (Heikkila, 2007). Beberapa menemukan bahwa pemerintahan adaptif dapat mendorong pengelolaan dan penggunaan aset bersama yang efektif seperti sumber daya bersama dan aset lingkungan yang menyediakan lingkungan organisasi (Dodds et al, 2007).

Pengembangan kapasitas pemerintah daerah merupakan bagian yang penting dalam organisasi maupun di kehidupan organisasi. Contohnya dapat dilakukan dengan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, Pelatihan sumber daya manusia dilakukan dalam organisasi dengan kata lain tidak akan terjadi suatu proses pelatihan atau pengembangan dalam hal apapun tanpa upaya pengembangan kapasitas bagi pelaku maupun juga sistem yang telah mengaturnya. Pentingnya pemerintah daerah adalah agar dapat meningkatkan performa aparatur yang ada dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi daerah dan regulasi kebijakan pemerintah daerah yang dijalankan. Tingkat penerapan desentralisasi disuatu Negara mendasari agar cara kebijakan pemerintah daerah dapat terlaksana dalam mencapai tujuannya. Pengembangan kapasitas pemerintah daerah memiliki tugas khusus yang berhubungan dengan faktor-faktor suatu organisasi atau sistem tertentu pada waktu tertentu.

Pengembangan kapasitas pemerintah daerah dilakukan untuk meningkatkan kemampuan individu, kelompok maupun organisasi itu sendiri diupayakan masyarakat ikut membantu dan untuk menganalisa lingkungan disekitar dengan mengenali masalah-masalah, kepentingan dan manfaat secara efektif dari sumber dasar yang mendukung pelaksanaannya (Farmer&Weston, 2002). Dalam pengembangan kapasitas pemerintahan adaptif memiliki tiga komponen, yaitu 1) pengembangan sumber daya manusia adaptif, 2) penguatan organisasi adaptif dan 3) pembaharuan institusional adaptif.

Konteks pengembangan sumber daya manusia memberikan perhatian yang diberikan kepada pengadaan atau penyediaan personel yang profesional.

Kegiatan dilakukan antara lain pendidikan dan latihan (*training*), sistem rekrutmen dan teknis. Hal ini berkaitan juga dengan penguatan organisasi pusat perhatian ditujukan kepada sistem koordinasi dari pejabatnya untuk menjalankan fungsi-fungsi yang ada dalam pengaturan struktur mikro dan aktifitas organisasi sehingga penulis berfokus pada *adaptive governance* dalam pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam pemberdayaan pedagang kaki lima di kabupaten Mamuju dengan menggunakan teori Grindle yaitu dimensi pengembangan sumber daya manusia, penguatan organisasi dan pembaharuan institusional.

Penelitian yang dilakukan (Rulinawaty kasmad, 2018) adalah untuk mengembangkan kemampuan jaringan kolaboratif lokal dalam implementasi kebijakan pengembangan bisnis kakao di Indonesia. Hasil dari pola berpasangan dan teknik deret waktu menunjukkan bahwa kelompok tani sebagai jaringan kolaborasi lokal tidak dapat melaksanakan kebijakan secara efektif. Hal ini disebabkan fakta bahwa pemerintah sebagai penggagas tidak memfasilitasi mereka untuk merancang program operasional yang dapat meningkatkan produktivitas kakao, komitmen mereka terhadap program Gernas Kakao (Gerakan Nasional Kakao) sangat rendah. Oleh karena itu, jaringan kolaboratif lokal sebagai tempat bagi semua pemangku kepentingan dalam pengembangan bisnis kakao membutuhkan mekanisme koordinasi dan komitmen diantara mereka untuk merancang dan mengimplementasikan program operasional Gernas Kakao konseptual.

Tujuan pemberdayaan (*empowerment*), berasal dari kata “*power*” (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya ide pokok pemberdayaan bersentuhan dengan adanya konsep tentang kekuasaan. Pemberdayaan merupakan suatu cara dengan mana rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya (Suharto, 2008).

Pedagang kaki lima (PKL) merupakan suatu kegiatan ekonomi dalam wujud sektor informal. Pedagang kaki lima adalah orang yang membuka usaha dibidang produksi, penjualan serta jasa dan dapat menggunakan modal yang relatif kecil dapat menempati ruang publik sebagaimana sektor informal yang ada pada pedagang kaki lima banyak menyerap tenaga-tenaga kerja yang cukup banyak. Pedagang kaki lima terus berkembang karena kenyataan sektor formal memiliki keterbatasan dalam menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat perkotaan. Negara berkembang termasuk Indonesia cenderung mencari dan memilih sektor informal sebagai pendukung pemenuhan kebutuhannya, hal ini disebabkan pedagang kaki lima menjadi alternatif pekerjaan bagi para pencari kerja yang tidak memiliki skill maupun legalitas formal pendidikan. Pedagang kaki lima bagaikan dua sisi mata uang yang bisa dianggap sebagai penyerap lapangan pekerjaan disisi lain dianggap sebagai penyakit masyarakat yang merusak tatanan kota maupun kebersihan serta menimbulkan berbagai kemacetan dijalan raya. (Rulinawaty kasmad, 2015).

Indonesia jumlah pedagang kaki lima tumbuh bagaikan cawan dimusim hujan, jumlah pedagang kaki lima di Indonesia mencapai 141 juta menurut catatan asosiasi pedagang kaki lima Indonesia pada tahun 2018 sedangkan

jumlah pedagang kaki lima di kabupaten Mamuju 68. Tetapi peneliti memfokuskan penelitian hanya di Anjungan pantai manakarra dan yang telah di ketahui jumlah pedagang kaki lima di Anjungan pantai manakarra sebanyak 49 stand para pedagang kaki lima.

Pembuatan peraturan Presiden no 125 tahun 2015, pedagang kaki lima adalah pelaku usaha yang telah melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana atau tempat usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas umum, lahan maupun bangunan milik pemerintah atau swasta yang bersifat sementara. Kemudian didukung peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia no 41 tahun 2012, tentang pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima serta pemerintah menetapkan peraturan Bupati Mamuju no 53 tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Semua regulasi yang lahirkan belum mampu membuat pemerintah dapat menangani masalah pedagang kaki lima yang menjadi masalah publik yang kompleks.

Penelitian yang dilakukan (Marsuq dan Oka Resia, 2019) tentang kapasitas adaptif menunjukkan ada kendala dalam pengembangan kapasitas disebabkan kurangnya sumber daya manusia yang profesional dalam mendukung kebijakan pemerintah daerah. Sementara akuntabilitas kebijakan menunjukkan pemberdayaan pedagang kaki lima di kabupaten Mamuju dirancang berdasarkan pendekatan *top-down*, sehingga dianggap sebagai objek yang harus menerima semua program pemerintah yang ditujukan padanya.

Negara demokratis, kedaulatan atau kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Dalam hal ini, masyarakat yang menentukan pemimpin dan delegasi wewenang untuk mengelola negara ini dapat memenuhi kepentingan mereka. Akibatnya para pemimpin yang telah memenangkan kepercayaan darinya dan pejabatnya (pejabat negara) harus mempertanggungjawabkan semua kinerjanya yang mencakup kebijakan program dan proyek yang dirancang untuk mereka melalui mekanisme negara yang berlaku. Di sinilah letak pentingnya pertanggung jawaban kepada para pejabat negara yang telah memberikan "dekrit" untuk mengelola negara dengan benar (tanpa korupsi, tanpa limbah, dan tanpa penipuan).

(Rulinawaty kasmad, 2015) kebijakan tersebut akan memberdayakan para pedagang kaki lima yang masih relatif miskin sebagaimana dimaksud oleh (Hudson & Lowe, 2004) bahwa tujuan dari kebijakan publik untuk mengatasi masalah publik, seperti masalah kemiskinan di Indonesia. Namun mereka juga perlu bertahan hidup termasuk dalam kehidupan ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UUD 1945 bahwa setiap orang berhak atas kehidupan dan pekerjaan yang layak seperti halnya pedagang kaki lima. Tetapi sumber masalah yang menyebabkan adanya kemacetan lalu lintas jalan raya di semua kota besar di Indonesia salah satunya karena adanya pedagang kaki lima.

Dari pembahasan di atas Penelitian ini akan mengukur faktor yang mempengaruhi penelitian mencoba menggunakan teori *capacity building* menurut model Grindle 1997 dan konsep *adaptive governance*. Penelitian ini menggabungkan dua konsep untuk mengukur bagaimana pengembangan

kapasitas pemerintah adaptif. Berdasarkan hal ini, maka penelitian ini mengangkat judul: “*Adaptive governance* dalam Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Mamuju.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dijadikan titik tolak dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengembangan sumber daya manusia dalam pengembangan kapasitas pemerintahan adaptif dalam pemberdayaan pedagang kaki lima di kabupaten Mamuju?
2. Bagaimana penguatan organisasi dalam pengembangan kapasitas pemerintahan adaptif dalam pemberdayaan pedagang kaki lima di kabupaten Mamuju?
3. Bagaimana pembaharuan institusional dalam pengembangan kapasitas pemerintahan adaptif dalam pemberdayaan pedagang kaki lima di kabupaten Mamuju?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka dapatlah dirumuskan beberapa masalah yang akan dijadikan titik tolak dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengembangan sumber daya manusia dalam pengembangan kapasitas pemerintahan adaptif dalam pemberdayaan pedagang kaki lima di kabupaten Mamuju.

2. Untuk mengetahui penguatan organisasi dalam pengembangan kapasitas pemerintahan adaptif dalam pemberdayaan pedagang kaki lima di kabupaten Mamuju.
3. Untuk mengetahui pembaharuan institusional dalam pengembangan kapasitas pemerintahan adaptif dalam pemberdayaan pedagang kaki lima di kabupaten Mamuju.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat akademis

Hasil dari penelitian ini di harapkan memberi sumbangan pemikiran intelektual kearah pengembangan ilmu pengetahuan sosial khususnya dalam bidang kajian pemerintahan dan sebagai bahan referensi bagi siapapun yang berkeinginan melakukan penelitian lanjutan pada bidang yang sama.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, peneliti ini dapat dijadikan sebagai sumbangan saran dan masukan bagi pemerintah khususnya dinas Perdagangan di kabupaten Mamuju.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep dan Teori

Adaptive governance berfungsi untuk meningkatkan peran *stret level* birokrasi, regulasi dan manajemen lainnya. Dengan dijalankannya *adaptive governance* dapat merangkum seluruh pola pemerintahan untuk mendefinisikan kembali peran mereka dan memfasilitasi tujuan pemerintah dalam kebijakan sumber daya alam dan organisasi. *Adaptive governance* bergantung pada pengaturan kelembagaan polisentris yang bersarang, unit pengambilan keputusan yang otonom dan beroperasi pada berbagai skala (McGinnis, 2011). Mencakup dari tingkat organisasi lokal ke tingkat yang lebih tinggi, institusi polisentris memberikan keseimbangan antara kontrol desentralisasi dan terpusat (imperial, 2005). Pemerintahan adaptif mengacu ke pemerintahan baru mendefinisikannya sebagai bentuk koordinasi sosial dimana tindakan dikoordinasikan secara sukarela oleh individu dan organisasi dengan kemampuan mengatur dan memperkuat diri sendiri.

Pemerintahan adaptif bergantung pada jaringan yang menghubungkan individu, organisasi, lembaga dan lembaga di berbagai tingkat organisasi (Folke et al, 2005). Bentuk pemerintahan ini juga menyediakan pendekatan kolaboratif fleksibel berbasis pembelajaran untuk mengelola ekosistem juga disebut sebagai "pengelolaan bersama adaptif" (Engle, N. L, 2011).

sosial-ekologis selama periode perubahan mendadak/krisis dan menyelidiki sumber sosial pembaruan reorganisasi. Tata kelola semacam itu menghubungkan individu, organisasi, lembaga dan lembaga di berbagai tingkat organisasi.

Sistem pemerintahan adaptif sering mengatur diri sendiri sebagai jejaring sosial dengan tim dan kelompok aktor yang memanfaatkan berbagai sistem pengetahuan dan pengalaman untuk pengembangan pemahaman kebijakan bersama. Munculnya agar dapat menjembatani organisasi yang tampaknya menurunkan biaya kolaborasi dan resolusi konflik dan legislasi yang memungkinkan adanya kebijakan pemerintah untuk mendukung swasusun sambil membingkai kreativitas untuk upaya pengelolaan bersama yang adaptif. Sistem sosial-ekologis yang tangguh dapat memanfaatkan krisis sebagai peluang untuk berubah menjadi negara yang lebih diinginkan.

Dalam teori *capacity building* menurut Model Grindle 1997 dan konsep *adaptive governance* menggabungkan dua konsep untuk mengukur bagaimana pengembangan kapasitas pemerintah adaptif dengan indikator sebagai berikut:

1. Pengembangan sumber daya manusia adaptif
2. Penguatan organisasi adaptif
3. Pembaharuan institusional adaptif

Dalam penyelenggaraan pengembangan kapasitas (*capacity building*), orientasi tersebut sangat berkaitan dengan dimensi reformasi kelembagaan pemerintah. Menurut (Hilderbrand, M. E., Grindle, M. S.,

Trostle, J. A., Sommerfeld, J. U., Simon, J. L., Lippincott III, D. F., & Contreras, M. E, 1997) adanya suatu kemajuan seperti pendapatan progres ekonomi-sosial institusi yang kaya dengan investasi dan saving selalu menghargai spesialisasi, meningkatkan hak dan tata cara permufakatan hanya mereka yang lulus uji efektifitas dan legitimasi. Teori kontrak sosial yang baru membahas konsep “*social capital, norm, political culture*” (modal sosial, norma, budaya politik) mengisyaratkan bahwa adanya lembaga pemerintah yang efektif karena atribusi kolektifitas dan kekuasaan politik yang sangat membutuhkan kesamaan dengan 4 (empat) norma kebenaran politis masyarakat seperti; struktur kewenangan (*structure of authority*), lingkup kewenangan (*scope of authority*), letak kewenangan (*location of authority*) dan sumber kewenangan (*source of authority*), Kalt dalam (Grindle, 1997).

Dalam beberapa literatur pembangunannya itu menyebabkan konsep *capacity building* sebenarnya masih menyisahkan sedikit perdebatan-perdebatan yang ada dalam pendefinisian penting. Sebagian para ilmuwan memaknai *capacity building* sebagai pengembangan kapasitas (*capacity development*) atau penguatan kapasitas (*capacity strengthening*) mengingatkan suatu prakarsa pengembangan kemampuan yang ada atau kapasitas yang sudah ada (*existing capacity*). Sementara yang lain lebih merujuk pada *constructing capacity* sebagai kerja kreatif membangun kapasitas yang belum terlihat. Penulis tidak menjelaskan salah satu sisi karena keduanya memiliki karakteristik diskusi yang sama yakni, analisa kapasitas

sebagai alat inisiatif untuk meningkatkan *government performance*. (Merilee S. Grindle, 1997).

B. Pengembangan kapasitas

Pengembangan kapasitas (*capacity building*) yaitu suatu upaya yang telah membuat pengembangan dan sekaligus mengembangkan suatu ragam-ragam strategi yang meningkatkan *effisiensi,efektivitas dan responsif* kinerja pemerintah. *Effisiensi* dalam waktu (*time*) dan sumber daya (*resources*) yang sangat dibutuhkan untuk mencapai suatu *efektivitas* berupa kepantasan usaha agar mendapat hasil yang diinginkan dan *responsif* yakni bagaimana mensinkronkan antara keduanya yaitu, kebutuhan dan kemampuan untuk maksud tersebut.

Pengembangan kapasitas menurut (Grindle, 1997) sebagai *ability to perform appropriate task effectively, efficiently and sustainable* (kemampuan untuk melakukan tugas yang sesuai secara efektif, efisien dan berkelanjutan). Sedangkan menurut (James V.U,1998) pengembangan kapasitas adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki rakyat Negara yang sedang berkembang agar rakyat mampu mengembangkan keterampilan manajemen dan kebijakan esensial yang sangat dibutuhkan agar dapat membangun struktur budaya, sosial politik, ekonomi dan juga sumber daya manusia sehingga eksis dalam peraturan global.

Pengembangan kapasitas (*capacity building*) yakni proses untuk meningkatkan usaha atau kemampuan seseorang dan dapat meningkatkan suatu organisasi ataupun sistem agar mencapai tujuan yang dicita-citakan, (Milen,

2001). Pengembangan kapasitas merupakan proses untuk melakukan suatu gerakan, perubahan multi level yang ada dalam individu, kelompok, organisasi maupun sistem dalam rangka memperkuat kemampuan individu dan organisasi agar mendapat tanggapan perubahan lingkungan. Sedangkan (Milen, 2001) menyatakan *capacity building* sebagai tugas khusus, karena tugas khusus berhubungan langsung dengan faktor-faktor yang ada dalam suatu organisasi maupun sistem tertentu dan pada waktu tertentu. Pengembangan kapasitas ini dapat diartikan sebagai proses untuk meningkatkan kemampuan individu, kelompok, organisasi, dan masyarakat (i) melindungi lingkungan mereka, (ii) mengetahui masalah, kepentingan dan kesempatan, (iii) memberikan strategi-strategi untuk dapat menyelesaikan masalah dan menyelesaikan kepentingan-kepentingan tersebut mendapat kesempatan yang relevan, (iv) membuat sebuah rencana untuk program dan (v) memanfaatkan secara efektif sumber-sumber dasar yang mendukung pelaksanaannya memantau dan mengevaluasi rencana program, serta (vi) menggunakan arus balik untuk dapat mempelajari pelajaran yang telah ada, (ACBF, 2001).

Sebagai program yang banyak berhubungan langsung dengan proyek pembangunan Negara dunia ketiga, pengembangan kapasitas (*capacity building*) ini telah menjadi bagian sangat penting dalam pembahasan lembaga internasional; *united nations* yang memberi rujukan “*capacity building*” berdimensikan pada; 1) mandat dan struktur legal, 2) struktur kelembagaan, 3) pendekatan manajerial, 4) kemampuan organisasi dan teknis, 5) kemampuan

fiskal lokal dan 6) aktivitas-aktivitas program world bank menekankan *capacity building* pada;

- a) Pengembangan sumber daya manusia: Training, rekrutmen dan teknis.
- b) Penguatan organisasi: Koordinasi dan aktifitas organisasi.
- c) Pembaharuan institusional: Ekonomi, politik dan sosial

Lingkungan organisasi meliputi aturan (*rule*) dan undang-undang (*legislation*) yang mengatur pelayanan publik dan tanggung jawab. Pengembangan kapasitas pemerintah daerah seringkali mengandung sebuah pemahaman tentang berbagai upaya agar dapat meningkatkan kinerja pelayanan terkhusus kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa pengembangan kapasitas kelembagaan dan faktor pendukung serta mengetahui penghambat yang banyak dihadapi dalam pengembangan pedagang kaki lima.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan melakukan pendekatan kualitatif dan fokus penelitian antara lain:

- 1) Pengembangan kapasitas kelembagaan.
- 2) Faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat pengembangan kapasitas kelembagaan.

C. Pemberdayaan PKL

Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yakni penelitian model atau strategi adaptasi pemberdayaan pedagang kaki lima menjadi pedagang merupakan penelitian lanjutan. (Trisni-Utami dkk, 2006) meneliti model pemberdayaan pedagang kaki lima melalui kerjasama antar *stake holder*.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa pemberdayaan pedagang kaki lima dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup para pedagang kaki lima sebagai kelanjutan upaya untuk pemberdayaan pedagang kaki lima, penelitian ini akan segera mengevaluasi dan berupaya agar mendapatkan model atau strategi adaptasi komunitas pedagang kaki lima menjadi pedagang pasar agar komunitas tersebut menjadi lebih berdaya.

Pemberdayaan pedagang kaki lima dalam upaya memaksimalkan pengentasan kemiskinan dalam pengertian konvensional umum yang dilihat dari suatu pendapatan (*income*). Maka sering kali upaya pengentasan kemiskinan hanya dapat bertumpu pada upaya peningkatan pendapatan para pedagang kaki lima. Pendekatan permasalahan kemiskinan dari semua segi peningkatan pendapatan (*income*) saja tidak mampu untuk memecahkan sebuah permasalahan para pedagang kaki lima karena yang ada dalam pemberdayaan pedagang kaki lima bukan hanya masalah ekonomi, namun meliputi berbagai masalah yang kompleks. Berdasarkan hal-hal diatas, diperlukan upaya strategi pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan pedagang kaki lima di kabupaten Mamuju antara lain:

- 1) Penguatan kapasitas bisnis dalam pengembangan kewirausahaan dikalangan pedagang baik melalui *training* atau *capacity building* untuk komunitas para pedagang kaki lima.
- 2) Sangat memerlukan pemberdayaan ekonomi melalui akses-akses bantuan untuk permodalan.
- 3) Perlu juga adanya komunikasi yang lebih dekat dengan para birokrat.

- 4) Perlu pendampingan para pedagang kaki lima dalam pemecahan masalah yang ada sangat terkait dengan kendala yang dihadapi pedagang kaki lima ditempat masing-masing.
- 5) Penataan dengan lingkup pendidikan yakni kebersihan lingkungan adalah agar tidak terjadi kekumuhan dan perilaku yang sangat tidak menguntungkan bagi pengembangan kebersihan dilingkungan.

D. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah berhasil dikumpulkan oleh penulis maka ada beberapa penelitian yang dikutip dan sangat relevan dengan penelitian yang akan saya lakukan dapat pula dijadikan contoh untuk melakukan penelitian. Adapun penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1 Penelitian yang terdahulu

No	Nama	Tahun	Judul Penelitian	Tujuan
1	Rulinawaty Kasmad	2015	<i>Implementation of the street vendors empowerment policy hetworking in Makassar city</i>	Tujuan penelitian ini berfokus pada kebersamaan dalam membahas solusi berbagai masalah di pedagang kaki lima dan dalam implementasi kebijakan. Penelitian ini juga menggunakan teori demokrasi.
2	Lin Zhang	2013	Efisiensi adaptif dan tatakelola perusahaan perusahaan terdaftar yang dikendalikan oleh Negara Tiongkok	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa efisiensi adaptif dan biaya agensi adalah faktor yang sama pentingnya yang harus dipertimbangkan ketika kami mengajukan proposal reformasi untuk tata kelola perusahaan SCLC. Dalam hal

				mengabaikan salah satu dari mereka, efisiensi keseluruhan akan terancam.
3	H. R. Riyadi Soeprapto	2006	Pengembangan kapasitas pemerintah daerah menujung <i>good governance</i>	Tujuan tersebut adalah agar pemerintah daerah dapat memiliki teritorial kekuasaan yang baik atau jelas (<i>legal teritorial of power</i>), memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri (<i>local own income</i>), memiliki badan perwakilan (<i>local representative body</i>) yang mampu untuk mengontrol eksekutif daerah dan adanya kepala daerah yang dapat dipilih sendiri langsung oleh masyarakat daerah, dapat juga melalui suatu pemilihan yang bebas.

Sumber: Dikumpulkan dari beberapa penelitian terdahulu.

Berdasarkan tabel 2.1 di atas maka perbedaan dari penelitian lain dengan penelitian ini yaitu mencoba mengkonstruksi konsep baru dimana menggabungkan dua konsep tersebut yaitu konsep *adaptive governance* dengan *capacity building* sehingga lahirlah organisasi adaptif. Konsep inilah yang akan digunakan untuk mengukur pemberdayaan organisasi adaptif dalam kebijakan pemberdayaan pedagang kaki lima.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu pada tabel nomor satu terletak pada kajian yang akan diteliti dan tujuan yang dilakukannya penelitian. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu pada tabel nomor satu terdapat pada program yang diteliti. Pada perbedaan penelitian ini dengan tabel nomor dua terletak pada program yang akan diteliti dan tujuan yang dilakukannya penelitian. Persamaan penelitian terdahulu pada tabel nomor tiga terletak pada bidang kajian yang akan diteliti.

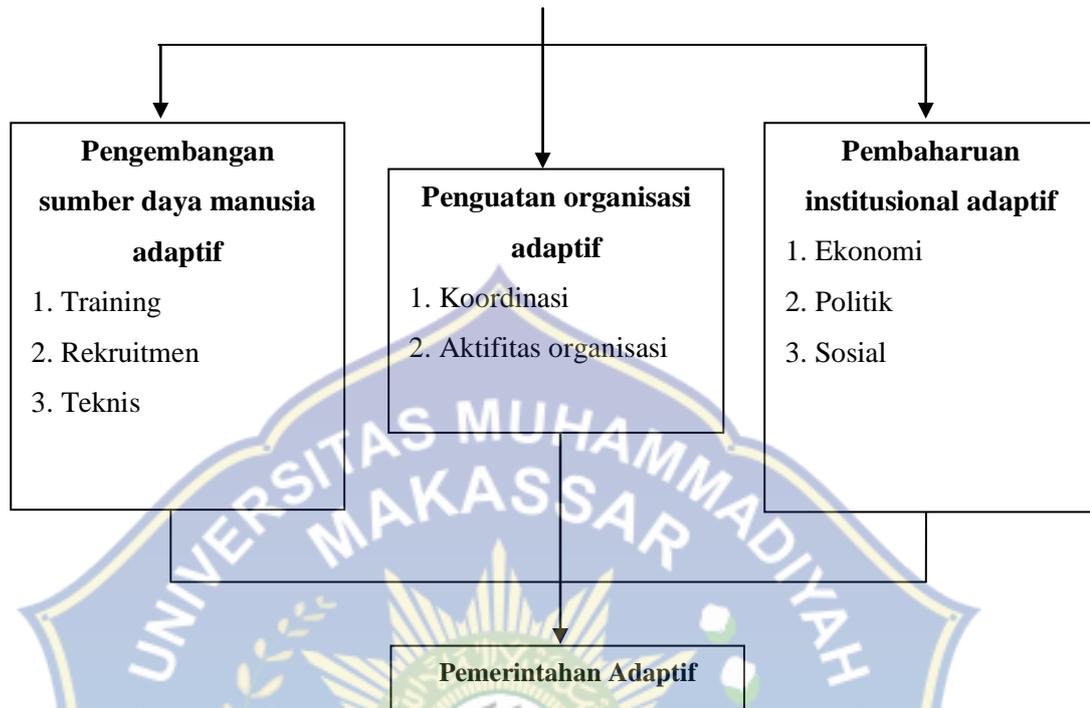
E. Kerangka Pikir

Pengembangan kapasitas (*capacity building*) yaitu suatu upaya yang telah membuat pengembangan dan sekaligus mengembangkan suatu ragam strategi yang meningkatkan *effisiensi, efektivitas dan responsive* kinerja pemerintah. *Effisiensi* dalam waktu (*time*) dan sumber daya (*resources*) yang sangat dibutuhkan untuk mencapai suatu *efektivitas* berupa kepastian usaha agar mendapat hasil yang diinginkan dan *responsif* yakni bagaimana mensinkronkan antara keduanya yaitu kebutuhan dan kemampuan. Pengembangan kapasitas juga dapat diartikan sebagai *ability to perform appropriate task effectively, efficiently and sustainable* (kemampuan untuk melakukan tugas yang sesuai secara efektif, efisien dan berkelanjutan). (Grindle, 1997).

Pedagog kaki lima dalam pengembangan kapasitas pemerintahan adaptif yang terdiri dari, pengembangan sumber daya manusia adaptif, penguatan organisasi adaptif dan reformasi instutional adaptif untuk mencari dalam kinerja pemerintahan adaptif. Adapun kerangka fikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Bagan Kerangka Pikir

<p>Pengembangan Kapasitas</p> <p>Pemerintahan Adaptif</p>



Gambar 2.2 Bagan Kerangka pikir

F. Fokus Penelitian

Adaptive governance melihat adanya saling ketergantungan terhadap praktek inovasi dalam ilmu pengetahuan kebijakan publik baik dalam perumusan kebijakan untuk mendesain struktur organisasi maupun implementasi kebijakan. *Adaptive governance* diharapkan agar mempercepat transisi dalam pengelolaan pemerintahan, agar masalah kompleks yang dihadapi oleh pemerintah saat ini dapat selesai dalam pemberdayaan pedagang kaki lima.

Pengembangan kapasitas pemerintah adaptif dilakukan untuk meningkatkan kemampuan individu, kelompok maupun organisasi itu sendiri dan diupayakan masyarakat ikut membantu menganalisa lingkungan disekitar dengan

mengenali masalah, kepentingan dan manfaat secara efektif dari sumber dasar yang mendukung pelaksanaannya. Dalam pengembangan kapasitas pemerintahan adaptif memiliki tiga komponen, yaitu 1) pengembangan sumber daya manusia adaptif, 2) penguatan organisasi adaptif dan 3) pembaharuan institusional adaptif. Berikut uraian 3 (tiga) komponen diatas :

1. Pengembangan sumber daya manusia adaptif yaitu usaha yang dilakukan oleh dinas perdagangan untuk membentuk sumber daya manusia aparatur dinas perdagangan yang berkualitas agar memiliki keterampilan, kemampuan kerja yang baik, loyalitas kerja kepada semua organisasi pemerintah yang meliputi : training, rekrutmen dan teknis.
2. Penguatan organisasi adaptif yaitu meningkatkan kualitas pembangunan dan kualitas pelayanan yang dilakukan pemerintah daerah untuk penguatan organisasi pada sektor yang datang dan meliputi : koordinasi dan aktifitas organisasi.
3. Pembaharuan institusional adaptif yaitu melakukan perubahan, perbaikan, penataan dan pengaturan secara independensi (netral) dan sistematis terhadap banyak hal terutama yang berkaitan dengan pemerintah adaptif, serta sistem bernegara dan berorganisasi yang meliputi : ekonomi, politik dan sosial.

Pemerintahan adaptif yaitu pemerintah yang mau berkembang untuk menganalisis masalah-masalah sosial, kelembagaan, ekonomi dan ekologi Model ini telah berhasil membangun dan menghadapi tantangan yang ditimbulkan dari perubahan global serba cepat.

G. Deskripsi Fokus penelitian

1. Pengembangan sumber daya manusia adaptif merupakan usaha yang telah dilakukan untuk menciptakan manusia yang baik dan sangat berkualitas dengan banyak memiliki keterampilan sendiri serta kemampuan kerja yang baik dan loyalitas kerja yang telah mereka miliki seperti halnya pedagang kaki lima yang ada di kabupaten Mamuju.
2. Penguatan organisasi adaptif adalah untuk meningkatkan kualitas pembangunan serta memiliki kualitas pelayanan yang telah diselenggarakan oleh pemerintah daerah pada semua sektor-sektor yang datang. Hal ini demikian menunjukkan bahwa tantangan yang telah dihadapi pemerintah atau organisasi daerah semakin kuat, terdapat juga pada pedagang kaki lima di kabupaten Mamuju.
3. Pembaharuan institusional adaptif adalah melakukan suatu perubahan, perbaikan, penataan dan pengaturan secara independensi komprehensif dan sistematis terhadap banyaknya perubahan pemerintah. Paling utama yang berkaitan dengan pemerintah adaptif, serta sistem bernegara, berorganisasi dan imparialitas institusional.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah 2 (dua) bulan. Penelitian ini dilakukan mulai tanggal 22 juni - 22 agustus 2019 di kantor Dinas Perdagangan kabupaten Mamuju. Pemilihan kabupaten Mamuju, karena di Mamuju terdapat kebijakan pemerintah dalam memperdayakan Pedagang Kaki Lima (PKL).

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang dimaksud yaitu penelitian Kualitatif dimana penelitian yang menggambarkan data yang berupa tulisan serta mengamati perilaku orang yang diamati. Penelitian Kualitatif akan menggambarkan hasil penelitian dalam penyelenggaraan pemberdayaan pedagang kaki lima.

Tipe penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif adalah mendeskripsikan kenyataan suatu pokok masalah yang diselidiki serta diiringi dengan interpretasi rasional yang akurat serta penelitian ini mencoba menganalisa untuk memberi kebenarannya berdasarkan data yang berbentuk kata, skema dan gambar yang memiliki masalah *Perfomance Basec Bureaucracy* pada aparatur sipil Negara. Deskriptif kualitatif ini mencoba menggambarkan apa yang terjadi dalam penelitian pemberdayaan pedagang kaki lima.

C. Sumber Data

Sumber data penelitian ini ada 2 (dua) yakni:

1. Data Primer

Adalah Data primer diperoleh dengan melakukan kunjungan langsung dengan melakukan wawancara dengan orang atau instansi yang dianggap bisa menjadi informan pada lokasi penelitian. Data Primer ini adalah data yang diambil untuk mengetahui perkembangan yang ada di dalam penelitian tersebut.

2. Data sekunder

Diperoleh melalui studi bahan kepustakaan yang berhubungan dengan topic penelitian seperti koran, buku dan sumber lainnya yang dapat mendukung data yang diperlukan dalam proses penelitian. Data Sekunder ini diambil untuk mengetahui perkembangan yang ada di dalam penelitian tersebut.

D. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini ditetapkan secara *purposive sampling* yaitu memilih dengan sengaja informan yang akan di mintai informasi. Berdasarkan pertimbangan bahwa merekalah yang memahami masalah yang sedang dipersoalkan dalam penelitian ini agar mendapat data yang akurat. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu:

1. Dinas Perdagangan

2. Dinas Satpol PP

3. Dinas Kebersihan

4. Dinas Perhubungan

5. Kelurahan

6. PKL

Tabel 3.1 informasi penelitian

No	Nama Informan	Inisial	Jabatan
1.	MUH. TASLIM SUKIRNO, SE	TS	Kepala Bidang Penguatan dan Pegawai SaranaDistribusi Perdagangan Dinas Perdagangan
2.	OKTOVIANUS TP, SE., MM	OT	Sekretaris Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju
3.	SURIYANTI, S, Sos	SY	Kepala Seksi Pelayanan dan Pengaduan Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Mamuju
4.	MAHMUD SAMAD, S. Pd	MS	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Mamuju
5.	IRHAM. S, SE, M.Si	IR	Lurah Binanga Kabupaten Mamuju
6.	MUH. SYABIR BACHTIAR, SE	SB	Kepala Seksi Perparkiran pada Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju
7.	AHMAD	A	Pedagang Kaki Lima
	Jumlah Informan		7 orang

Jumlah seluruh Informan yaitu 7 orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu:

1. Observasi (Pengamatan)

Pada metode pengamatan ini peneliti melakukan observasi dengan terjun langsung kelokasi yang diteliti untuk mendapatkan informasi yang jelas. Jenis observasi ini juga dilakukan dengan cara terbuka, cara ini dilakukan agar mampu mengetahui kejujuran informan yang sebenar-benarnya.

2. Wawancara Langsung

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara secara langsung dan mendalam untuk mendapatkan informasi. Dalam proses wawancara ini, peneliti menggunakan alat bantu seperti, buku tulis, pulpen dan alat perekam agar proses wawancara dapat berjalan dengan lancar untuk memudahkan peneliti mengingat dan menalar kembali hasil wawancara saat penelitian dalam suatu bentuk karya ilmiah.

3. Dokumentasi

Data-data yang didapatkan oleh peneliti yang berkaitan dengan objek peneliti didapatkan dari sumber buku data yang tersimpan dalam website.

F. Tehnik Analisis Data

Analisis data perlu digunakan dalam penelitian dapat dilakukan dengan menerapkan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Adalah langkah untuk mengumpulkan berbagai data yang diperlukan dalam penelitian. Peneliti mengumpulkan data penelitian dengan wawancara mendalam, observasi, dokumentasi serta beberapa referensi buku maupun penelusuran online.

2. Reduksi Data (*data reduction*)

Mereduksi data sama dengan merangkum, memilih hal-hal yang penting memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari juga tema dan polanya. Data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang sangat lebih jelas.

3. Penyajian Data (*data display*)

Dalam penelitian kualitatif penyajian dalam menyajikan data selain data dalam bentuk narasi kalimat, juga dapat meliputi berbagai jenis matrik, gambar atau skema, jaringan dan yang berkaitan dengan kegiatan dan juga tabel sebagai pendukung narasi.

4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*).

Langkah selanjutnya dalam menganalisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan yang dilaksanakan pada aktifitasnya saat pengumpulan data yang sudah cukup dan selesai. Langkah ini berinteraksi sampai diperoleh kesimpulan yang matang apabila

kesimpulan dirasakan kurang lengkap, maka akan dilakukan pengumpulan data kembali dilapangan sasaran yang sudah fokus. Penelitian melakukan uji kebenaran terhadap kata yang muncul dari data, melalui pengecekan ulang kepada informan pendukung terhadap setiap data yang didapat. Selain itu, peneliti melakukan diskusi terhadap intreprastasi pada pihak-pihak lain baik yang ada dilapangan maupun diluar lapangan, sehingga dapat memperoleh kesimpulan mengenai *Adaptive governance* dalam Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam kebijakan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Mamuju.

G. Keabsahan Data

Salah satu cara yang dilakukan oleh peneliti dalam pengujian kredibilitas data adalah dengan 3 triangulasi. Triangulasi yaitu sebagai pengecekan suata data penting dari berbagai sumber dengan berbagai tahap dan berbagai waktu. Lebih lanjut lagi dibagi triangulasi menjadi 3 (tiga) macam yaitu:

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber adalah membandingkan dengan cara mengecek berulang-ulang derajat kepercayaan dari suatu informasi yang ada dan diperoleh dari sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara dari informan kemudian membandingkan apa yang dikatakan oleh informan yang satu dengan informan lainnya dan membandingkan hasil wawancara dengan

dokumen yang ada untuk melihat perbedaan dan kesamaan pendapat yang akan dilihat dari hasil wawancara dan dokumen.

2. Triagulasi Teknik

Tehnik data untuk memperoleh informan yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu penulis menggunakan tehnik pengumpulan data yaitu, untuk menguji akuratnya sebuah data maka penelitian menggunakan tehnik tertentu yang berbeda dengan tehnik yang digunakan sebelumnya.

3. Triagulasi Waktu

Triagulasi waktu digunakan untuk validasi data yang berkaitan dengan pengecekan data dari berbagai sumber yang didapat dengan semua cara dan juga berbagai waktu. Perubahan suatu proses dan perubahan manusia mengalami perubahan dari waktu ke waktu untuk mendapatkan data yang sah melalui observasi penelitian perlu diadakan pengamatan tidak hanya satu kali pengamatan saja.

BAB IV
PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DESKRIPSI HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Gambaran Umum Kabupaten Mamuju

Kabupaten Mamuju adalah Ibu Kota dari Provinsi Sulawesi Barat terletak pada posisi antara $113^{\circ}38'110''$ - $2^{\circ}54'552''$ Lintang Selatan dan $113^{\circ}54'47''$ - $13^{\circ}5'35$ Bujur Timur. Secara administratif Kabupaten Mamuju mempunyai batas-batas wilayah yaitu :

- 1) Sebelah utara : berbatasan dengan kabupaten Mamuju Tengah
- 2) Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Majene, Kabupaten Mamasa dan kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan
- 3) Sebelah Timur : berbatasan dengan Luwu Utara Provinsi Sulawesi selatan dan sebelah barat berbatasan dengan selat Makassar.

Kondisi geografis Mamuju yang berupa deretan pegunungan menunjukkan jika aksesibilitas antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya akan dihubungkan oleh jalur darat. Penghubung jalur darat ini dikenal sebagai jalan transportasi antar kabupaten. Pembukaan jalan dan peningkatan kualitas jalan mutlak diperlukan jika ingin meningkatkan kualitas perekonomian. Pada tahun 2014, panjang jalan darat di

kabupaten Mamuju sepanjang 1.291,60 KM, panjang jalan ini sebagian besar merupakan jalan yang dikelola pemerintah kabupaten Mamuju yang sekitar 797,90 KM keseriusan pemerintah kabupaten Mamuju dalam meningkatkan kegiatan perekonomian ini nampak dari peningkatan panjang jalan ini dari tahun sebelumnya yang sebesar 717,90 KM atau meningkat 80,00 KM. Meningkatnya panjang jalan ini langsung maupun tidak langsung memiliki dampak terhadap capaian pertumbuhan ekonomi kabupaten Mamuju yang pada tahun 2014 mencapai 8,76 persen.

2. Kantor Dinas Perdagangan

Dinas Perdagangan kabupaten Mamuju merupakan pelaksana pemerintah kabupaten di bidang perdagangan yang berkewajiban menyusun rencana strategi agar dapat menentukan arah perkembangan dalam hal peningkatkan kinerjanya. Dinas perdagangan mempunyai visi dan misi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :

1. Visi: “Perdagangan sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah untuk kesejahteraan masyarakat Mamuju”.

Rumusan Visi Tersebut mengandung arti dan makna sebagai berikut :

- a. Penggerak pertumbuhan ekonomi diartikan, bahwa perdagangan dapat memberikan kontribusi sumbangan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.
- b. Kesejahteraan masyarakat diartikan, bahwa aktivitas perdagangan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi

masyarakat akan dapat dirasakan dengan meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat.

2. Misi:

Untuk mewujudkan Visi, maka ditetapkan Misi sebagai berikut :

- a. Mewujudkan penerapan metrologi legal, guna terciptanya kepastian hukum dan perlindungan, baik untuk konsumen maupun produsen.
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelaku usaha melalui bimbingan dan pelatihan, layanan informasi dan konsultasi secara terpadu.
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur dalam rangka mewujudkan pelayanan yang akuntabel.
- d. Meningkatkan penggunaan produk dalam Negeri serta mengendalikan distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat.

Dinas Perdagangan melakukan rencana kerja ini disusun agar apa yang direncanakan dapat dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dapat berhasil sesuai yang diharapkan dengan memperhatikan potensi ada baik pada sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Rencana strategi disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan diimplementasikan kedalam Rencana kerja (RENJA) tahunan. Rencana kerja adalah proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada dan yang mungkin timbul, yang merupakan

implementasi Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional, bahwa setiap perangkat daerah pelaksana teknis pemerintahan kabupaten/kota berkewajiban melakukan penyusunan rencana strategi sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan untuk dijabarkan kedalam rencana kerja tahunan yang telah disinkronisasikan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), sehingga konsistensi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dapat berkesinambungan dalam kurun waktu lima (5) tahun 2016-2021. Sedangkan berdasarkan Permendagri 54 Tahun 2010, rencana strategi organisasi adalah perangkat daerah yang disingkat dengan RENSTRA OPD yaitu adalah dokumen perencanaan OPD (organisasi perangkat daerah) untuk periode 5 (lima) tahun.

Substansi muatan Renstra berdasarkan Permendagri 54 Tahun 2010 pasal 85 Renstra OPD memuat: visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan. Renstra OPD (organisasi perangkat daerah) disusun dengan tahapan sebagai berikut: persiapan penyusunan Renstra, penyusunan rancangan Renstra, penyusunan rancangan akhir Renstra dan penetapan Renstra OPD (Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 89 ayat 2). Peraturan perundangan yang menjadi pedoman penyusunan Renstra OPD adalah Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Lampiran IV tentang tahapan dan tata cara penyusunan rencana strategi organisasi perangkat daerah (Renstra OPD).

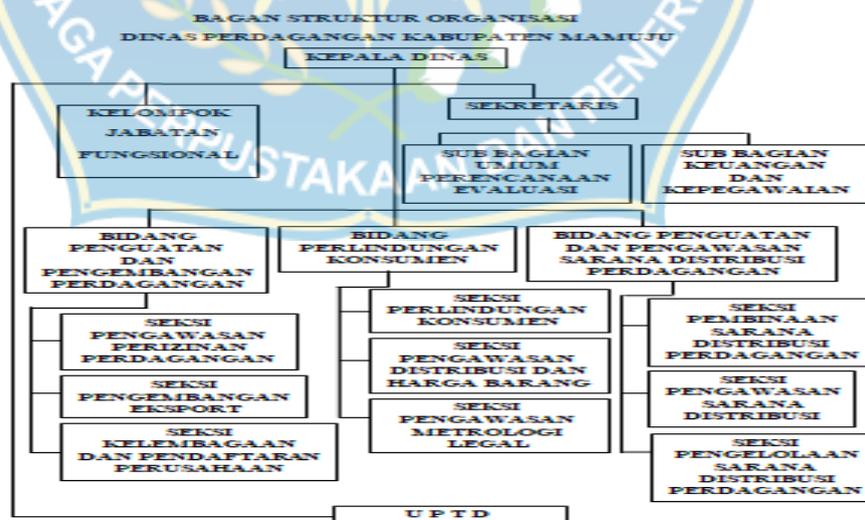
3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan peraturan Bupati Mamuju nomor 44 tahun 2016 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Dinas perdagangan Kabupaten Mamuju (berita daerah tahun 2016, nomor 559). Dinas perdagangan membuat unsur pelaksana pemerintah kabupaten dalam bidang perdagangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris daerah.

1. Tugas Pokok

Dinas Perdagangan mempunyai tugas yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadikan kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang telah diberikan kepada kabupaten di bidang Perdagangan.

2. Bagan struktur



Sumber: Dinas perdagangan kabupaten mamuju

3. Tujuan

Beberapa tujuan kantor dinas Perdagangan antara lain:

- a. Meningkatkan peranan perdagangan sehingga mampu memperluas lapangan kerja dan kesempatan usaha serta meningkatkan produktivitas dan mampu bersaing.
- b. Meningkatkan efisiensi perdagangan dalam negeri, pengawasan peredaran barang/jasa dan pengembangan Ekspor.
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan dan mewujudkan pasar dan pedagang kaki lima yang tertib, bersih, indah dan nyaman.
- d. Meningkatkan pelayanan administrasi dan profesionalisme sumber daya alam aparaturnya perdagangan dan pasar.

4. Sasaran

- a. Penyerapan tenaga kerja, investasi dan pertumbuhan berbagai jenis usaha di bidang perdagangan.
- b. Meningkatkan volume perdagangan dan kelancaran jaringan distribusi barang dan jasa.
- c. Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi pasar.
- d. Meningkatkan daya saing komoditi ekspor.
- e. Meningkatkan jumlah pasar dan pedagang kaki lima yang tertib, bersih dan nyaman.
- f. Meningkatnya pelayanan Administrasi, profesional aparaturnya, pembinaan dan kedisiplinan pegawai.

Sebagai upaya dalam menunjang pembangunan sektor perdagangan pada masa yang akan datang maka di perlukan sumber daya manusia yang mencukupi secara kuantitas maupun kualitas. Kondisi sumber daya manusia yang ada pada dinas perdagangan Kabupaten Mamuju saat ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 4.1 : Menurut golongan kepangkatan, pegawai Dinas Perdagangan dapat di kelompokkan menjadi :

NO	GOLONGAN KEPANGKATAN	JUMLAH
1.	Golongan IV, sebanyak 4 orang, terdiri dari :	
	a. Golongan IV/c	1 orang
	b. Golongan IV/b	1 orang
	c. Golongan IV/a	2 orang
2.	Golongan III, sebanyak 17 orang, terdiri dari :	
	a. Golongan III/d	4 orang
	b. Golongan III/c	6 orang
	c. Golongan III/b	6 orang
	d. Golongan III/a	1 orang
3.	Golongan II, sebanyak 13 orang terdiri dari :	
	a. Golongan II/d	1 orang
	b. Golongan II/c	6 orang
	c. Golongan II/b	5 orang
	d. Golongan II/a	1 orang

Sumber: Dinas Perdagangan 2019

Tabel 4.2 : Menurut status Kepegawaian, pegawai Dinas Perdagangan dapat di Kelompokkan menjadi :

NO	PEGAWAI	JUMLAH (Orang)
1.	PNS	34
2.	CPNS	0
3.	PTT (Pegawai tidak tetap)	37
	JUMLAH	71

Sumber: Dinas perdagangan, 2019

B. Adaptive Governance dalam Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Mamuju

Adaptive governance merupakan istilah yang telah digunakan untuk menggambarkan suatu proses pembelajaran melalui pemantauan ekosistem ketindakan tertentu, diikuti oleh perubahan yang meningkat dalam tindakan berdasarkan apa yang telah dipelajari. Jadi inti *Adaptive governance* adalah bagaimana organisasi belajar mengikuti perkembangan lingkungannya. *Adaptive governance* berfungsi untuk meningkatkan peran stret level birokrasi, regulasi, dan manajemen lainnya. Dengan dijalankannya *Adaptive governance* dapat merangkum seluruh pola pemerintahan untuk mendefinisikan kembali peran mereka dan memfasilitasi tujuan pemerintah dalam kebijakan sumber daya alam dan organisasi.

Pengembangan kapasitas (*capacity building*) yaitu suatu upaya yang telah membuat pengembangan dan sekaligus mengembangkan suatu ragam-ragam strategi yang meningkatkan *effisiensi, efektivitas, dan responsive* kinerja pemerintah. *Effisiensi* dalam waktu (*time*) dan sumber daya

(*resources*) yang sangat dibutuhkan untuk mencapai suatu *efektivitas* berupa kemandirian usaha agar mendapat hasil yang diinginkan dan *Responsif* yakni bagaimana mensinkronkan antara keduanya yaitu, kebutuhan dan kemampuan.

Pemberdayaan pedagang kaki lima yakni penelitian model atau strategi adaptasi pemberdayaan pedagang kaki lima menjadi pedagang merupakan penelitian lanjutan. Trisni-Utamidkk (2006) meneliti model pemberdayaan pedagang kaki lima dengan bekerjasama antar stake holder. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa pemberdayaan pedagang kaki lima dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup para pedagang kaki lima. Sebagai kelanjutan upaya untuk pemberdayaan pedagang kaki lima, penelitian ini akan segera mengevaluasi dan berupaya agar mendapatkan model atau strategi adaptasi komunitas pedagang kaki lima dan dapat menjadi pedagang pasar agar komunitas tersebut menjadi lebih berdaya.

Pemberdayaan pedagang kaki lima dalam upaya memaksimalkan pengentasan kemiskinan dalam pengertian konvensional umum yang dilihat dari suatu pendapatan (*income*). Maka seringkali upaya pengentasan kemiskinan hanya dapat bertumpu pada upaya-upaya peningkatan pendapatan para pedagang kaki lima. Pendekatan permasalahan kemiskinan dari semua segi peningkatan pendapatan (*income*) saja tidak mampu untuk memecahkan sebuah permasalahan para pedagang kaki lima karena, yang ada dalam pemberdayaan pedagang kaki lima bukan hanya masalah ekonomi, namun meliputi berbagai masalah yang kompleks.

Dari penjelasan diatas maka dalam penelitian ini akan diuraikan Adaptive governance dalam pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Mamuju. konsep yang digunakan untuk mengatur pemberdayaan organisasi adaptif dalam kebijakan pemberdayaan pedagang kaki lima dalam pengembangan kapasitas pemerintahan adaptif yang terdiri dari, (1) Pengembangan sumber daya manusia Adaptif, (2) Penguatan Organisasi Adaptif, dan (3) Reformasi Institutional Adaptif untuk mencari dalam kinerja pemerintahan Adaptif. Hasil pengkajian ketiga hal tersebut adalah sebagai berikut:

1) Pengembangan Sumber daya manusia Adaptif

Sumber daya Manusia (SDM) merupakan suatu rancangan dari sistem formal pada sebuah organisasi dengan tujuan memastikan penggunaan dari keahlian manusia secara efektif serta efisien untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan keinginan (Mathis dan Jackson 2006). Senada dengan itu pengembangan sumber daya manusia dalam pemerintahan adaptif adalah suatu pengembangan sumber daya manusia yang telah di kelola pemerintah agar tetap diketahui pegawai dan masyarakat meskipun diera global yang semakin pesat. Upaya ini dilakukan pemerintah untuk lebih meningkatkan kemampuan yang telah dimiliki pegawai agar dapat mengembangkan keterampilan manajemen, skill pelayanan dan kebijakan esensial yang sangat dibutuhkan dan juga dapat membangun struktur budaya, sosial politik, dan ekonomi Negara. Sumber daya manusia sangat penting karena memiliki proses dan upaya untuk merekrut,

mengembangkan, memotivasi, serta melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap sumber daya manusia yang dibutuhkan perusahaan dalam mencapai tujuan.

Tabel. 4.3 Pengembangan sumber daya manusia Adaptif (SDM)

NO	INFORMAN	TRAINING	REKRUTMEN	TEKNIS
1	Dinas Perdagangan	Melakukan pelatihan kewirausahaan	Mendatangi kantor Dinas Perdagangan	Tidak ada
2	Dinas Perhubungan	Pelatihan pentingnya perparkiran	Tidak ada	Tidak ada
3	Dinas Kebersihan	Pelatihan pentingnya hidup higienis bagi diri maupun masyarakat sekitar	Tidak ada	Mengadakan perlombaan kebersihan untuk para Pedagang kaki lima
4	Satpol PP	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
5	Lurah Binanga	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
6	Pedagang kaki lima	Mengikuti pelatihan dari setiap instansi yang membuat	Mendaftar dikantor Dinas Perdagangan	Mengikuti semua perlombaan ataupun kegiatan yang dilakukan setiap

		kegiatan		instansi
--	--	----------	--	----------

Sumber : Reduksi data, 2019

Dari tabel diatas penelitian menunjukkan pengembangan sumber daya manusia dilihat dari kantor dinas Perdagangan dalam segi Training yaitu dinas perdagangan melakukan pelatihan kewirausahaan, pelatihan ini diikuti oleh pegawai serta pedagang kaki lima, dinas perdagangan mengikutkan pegawai agar para pegawai mengetahui tentang kewirausahaan dan bisa untuk disalurkan ke pedagang kaki lima yang baru ataupun dengan pedagang kaki lima yang lama tetapi masih tidak mengerti dengan kewirausahaan. Segi rekrutmen, para pedagang kaki lima mengambil formulir pendaftaran hanya di kantor dinas perdagangan. Tetapi segi teknis dinas perdagangan tidak melakukan apa-apa.

Kantor dinas perhubungan dapat dilihat dari segi Training yaitu melakukan kegiatan pelatihan pentingnya mematuhi parkiran lalu lintas ini bisa dilihat dari tabel diatas, tetapi dari segi rekrutmen dan teknis dinas perhubungan sama sekali tidak melakukan aktivitas, dinas perhubungan hanya melakukan training kegiatan pelatihan saja. Dari kantor dinas Kebersihan dapat dilihat bahwa training yang dilakukanya itu pelatihan tentang pentingnya hidup higienis baik untuk diri sendiri maupun masyarakat, segi rekrutmen untuk para Pedagang kaki lima tidak melalui dinas kebersihan, dan dari segi Teknis dinas kebersihan melakukan perlombaan kebersihan untuk para Pedagang kaki lima di sekitar stand

berdagang mereka dan yang paling bersih akan mendapatkan hadiah dari dinas kebersihan, dan sangat membuat para Pedagang kaki lima semangat melakukan perlombaan itu karena mendapat *reward*. Nyatanya benar bahwa aktivitas teknis yang dilakukan dinas kebersihan berdampak positif, karena tidak hanya bersih tetapi lingkungan dan jalan terlihat rapih dan sudah tidak ada lagi sampah yang berserakan di jalan. Dari Satpol PP dapat dilihat bahwa aktivitas yang dilakukan baik itu training, rekrutmen dan teknis tidak ada aktivitas sama sekali, hal tersebut sering mengakibatkan Satpol PP dan para pedagang kaki lima cekcok karena tidak ada tanggungjawab yang dilakukan Satpol PP untuk Pedagang kaki lima. Lurah binanga juga tidak ada aktivitas yang dilakukan baik training, rekrutmen maupun teknis. Dan yang terakhir dari pedagang kaki lima dapat dilihat dari segi training, pedagang kaki lima sering mengikuti pelatihan-pelatihan yang dibuat instansi, menurut mereka pelatihan tersebut sangat bagus, karena selain menambah ilmu ataupun wawasan pelatihan ini tidak dipungut biaya sama sekali (gratis), dari segi rekrutmen pedagang kaki lima memanggil rekan yang ingin mengambil formulir dan mendatangi kantor dinas perdagangan, dan dari segi teknis pedagang kaki lima mengikuti semua perlombaan yang di adakan setiap instansi, menurut mereka perlombaan paling mereka sukai jika adanya hadiah yang bisa mereka gunakan untuk berdagang. Dalam teori Grindle pengembangan sumber daya manusia dalam pemerintahan adaptif adalah suatu pengembangan sumber daya manusia yang telah di kelola pemerintah agar

tetap diketahui dan dirasakan masyarakat, Hal ini bisa dilihat dari wawancara:

a. Training

Training adalah proses untuk mengajarkan seseorang/pegawai tentang keterampilan atau pengetahuan yang belum diketahui yang nantinya akan dilakukan di dalam pekerjaan maupun usahanya. Maka dari itu mengenai Training yang dilakukan oleh dinas Perdagangan berikut hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang penguatan dan pegawai sarana distribusi perdagangan Dinas Perdagangan sebagai berikut :

“Ya, kalau Training selalu dilakukan di kantor ini, training tentang kewirausahaan. Training yang kami lakukan tidak hanya khusus para pedagang kaki lima, tetapi kami mengikutkan beberapa pegawai sesuai bidang mereka untuk dapat mengetahui dan menambah wawasan tentang kewirausahaan, agar pegawai dapat mengajarkan kepada pedagang kaki lima yang baru ataupun pedagang kaki lima yang sudah lama”. (Wawancara dengan bapak TS, 1 Juli 2019).

Hal serupa juga dikemukakan oleh Sekretaris Dinas lingkungan hidup dan kebersihan kabupaten Mamuju yang mengatakan bahwa :

“Training di kantor ini sering dilakukan, setiap pegawai dan kami ikutkan juga beberapa pedagang kaki lima. Training yang kami lakukan pentingnya hidup higienis baik bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat sekitar. Ini sangat penting bagi pedagang kaki lima, terlebih pedagang kaki lima yang harus sering menjaga lingkungan dengan bersih karena mereka menyediakan makanan bagi masyarakat yang berbelanja di stand mereka”. (Wawancara dengan bapak OT, 4 Juli 2019).

Wawancara bersama kepala seksi perparkiran pada bidang lalu lintas dinas perhubungan kabupaten Mamuju mengatakan bahwa:

“Training yang kami lakukan kepada pegawai kantor yaitu memberikan pelatihan tentang pentingnya hidup higienis atau sehat bagi diri sendiri maupun masyarakat umum. Kami mengadakan pelatihan tentang pentingnya hidup sehat untuk para pegawai agar dapat tetap menjaga kebersihan di sekitaran kantor, pelatihan ini berdampak positif bagi para Pedagang kaki lima karena sangat cocok untuk mereka berjualan dan harus tetap menjaga kebersihannya agar menjamin makanan yang mereka jual bersih dan akan banyak pengunjung yang datang ke stand mereka” (wawancara bersama bapak SB, 7 Juli 2019).

Wawancara bersama kepala seksi pelayanan dan pengaduan dinas Satpol PP dan Damkar kabupaten Mamuju yang mengatakan bahwa:

“Kantor kami tidak melakukan training terhadap pedagang kaki lima, kami hanya melakukan training kepada anggota kami. Karena tugas kami dalam menangani para pedagang kaki lima hanya mengatur stand para pedagang kaki lima, jika mereka tidak mematuhi aturan baru lah kami bergerak untuk mengatur para pedagang kaki lima”. (wawancara bersama ibu SY, 7 Juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dinas Perdagangan dalam segi Training yaitu melakukan pelatihan kewirausahaan, pelatihan ini diikuti oleh pegawai serta pedagang kaki lima, Dinas perdagangan mengikutkan pegawai agar para pegawai mengetahui tentang kewirausahaan dan bisa untuk disalurkan ke pedagang kaki lima yang baru ataupun dengan pedagang kaki lima yang lama tetapi masih tidak mengerti dengan kewirausahaan. Dari kantor Dinas kebersihan dapat dilihat bahwa training yang dilakukan yaitu pelatihan tentang pentingnya hidup higienis baik diri sendiri maupun masyarakat. Dinas perhubungan training yang mereka lakukan untuk

pedagang kaki lima yaitu memberikan pelatihan tentang pentingnya hidup higienis bagi diri sendiri maupun masyarakat sekitar atau umum, ini sangat cocok dan harus diterapkan para pedagang kaki lima agar makanan yang mereka jual tetap bersih. Dan Satpol PP sama sekali tidak melakukan kegiatan training kepada pedagang kaki lima, mereka hanya training tentang pengaturan pedagang kaki lima untuk para anggota satpol pp saja agar dapat mengetahui tentang aturan yang harus dipatuhi pedagang kaki lima.

b. Rekrutmen

Rekrutmen adalah proses menarik, dan memilih orang yang memenuhi syarat pekerjaan. Mengenai Rekrutmen oleh dinas perdagangan berikut hasil wawancara penulis dengan Kepala bidang penguatan dan pegawai sarana distribusi perdagangan Dinas Perdagangan sebagai berikut:

“Rekrutmen tidak ada untuk para pegawai dikantor ini semua jalur ASN (aparatur sipil Negara) tidak ada dari mereka satupun yang jalur lain selain ASN. Dan untuk pedagang kaki lima tempat pengambilan formulir hanya di kantor dinas Perdagangan, mereka yang memberitahu rekan mereka jika ada ingin mendaftar bisa langsung mendatangi kantor dengan membawa data yang telah di suruh untuk dilengkapi” (Wawancara dengan bapak TS, 1 Juli 2019).

Hal serupa juga dikemukakan oleh pedagang kaki lima yang mengatakan bahwa:

“Kami mendatangi langsung di kantor dinas Perdagangan, tidak ada tempat pendaftaran lagi selain di dinas perdagangan”. (Wawancara dengan bapak AH, 4 Juli 2019).

Wawancara bersama Lurah binanga kabupaten Mamuju mengatakan bahwa:

“Rekrutmen untuk pegawai di kantor lurah rata-rata jalur ASN. Ada beberapa pegawai masih Kontrak atau sukarela mereka jalur pemerintah, tidak ada yang merekrut atau memilih orang untuk dapat bekerja di kantor lurah. Dan untuk para pedagang kaki lima itu tidak ada, ini hanya kemauan masyarakat jika ingin berjualan atau pedagang kaki lima mereka datang ke kantor dinas perdagangan untuk mendaftarkan diri mereka dan mengikuti persyaratan sesuai yang ada. Kalau melalui pendaftaran hanya kantor dinas perdagangan, kami hanya bekerjasama dengan dinas perdagangan”. (wawancara bersama bapak IH, 7 Juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dari segi rekrutmen semua pegawai dilain instansi yang bekerjasama dengan Dinas Perdagangan semua melalui jalur ASN (aparatur sipil Negara) tidak ada melalui jalur lain selain pemerintah dan untuk para pedagang kaki lima dengan cara mengambil formulir pendaftaran itu hanya di kantor dinas Perdagangan. Segi Rekrutmen pedagang kaki lima memanggil rekan yang ingin mengambil formulir dan mendatangi kantor dinas Perdagangan, dan dari Kantor dinas Perhubungan, dinas Kebersihan, Satpol pp dan lurah binangan tidak melakukan perekrutan atau pendaftaran para pedagang kaki lima.

c. Teknis

Teknis adalah struktur sosial formal stabil yang memiliki sumber-sumber yang berasal dari lingkungan dan memproses sumber-sumber menghasilkan *Output*. Mengenai Teknis yang dilakukan oleh dinas

Perdagangan berikut hasil wawancara penulis dengan Sekretaris dinas lingkungan hidup dan kebersihan kabupaten Mamuju sebagai berikut :

“Teknis yang kami lakukan untuk pegawai dan pedagang kaki lima yaitu mengadakan perlombaan untuk pegawai dan para pedagang kaki lima di setiap minggu. Kantor dan stand yang paling bersih akan kami berikan hadiah. Kami melakukan perlombaan agar pegawai dan pedagang kaki lima mempunyai semangat dalam membersihkan lingkungan sekitar. Ini tidak hanya menguntungkan bagi kantor maupun pedagang kaki lima tetapi bagi pemerintah juga, agar lingkungan sekitar bersih terhindar dari sampah-sampah yang berserakan.” (Wawancara dengan bapak MS, 5 Juli 2019).

Hal serupa juga dikemukakan oleh Pedagang kaki lima yang mengatakan bahwa :

“Kami mengikuti semua kegiatan ataupun perlombaan yang telah dibuat kantor-kantor. Menurut kami itu sangat baik bagi kami semua, dari kegiatan dan perlombaan sangat membuat kami antusias mengikuti semuanya”. (wawancara bersama bapak AH, 4 Juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, menjelaskan dari segi teknis dinas kebersihan melakukan perlombaan kebersihan kepada para pegawai di setiap instansi di kabupaten Mamuju untuk membersihkan sekitaran kantor baik di dalam ruangan maupun di halaman dan untuk para pedagang kaki lima di sekitaran stand berdagang mereka yang paling bersih akan mendapatkan hadiah dari dinas kebersihan, itu sangat membuat para pegawai dan pedagang kaki lima sangat antusias melakukan perlombaan itu karena mendapat *reward*. Nyatanya benar bahwa aktivitas teknis yang dilakukan dinas kebersihan berdampak positif, karena tidak hanya bersih tetapi lingkungan dan jalan terlihat rapih dan sudah tidak ada lagi sampah yang berserakan. Dari segi

Teknis pedagang kaki lima mengikuti semua perlombaan yang di adakan setiap instansi, menurut mereka perlombaan paling mereka sukai jika adanya hadiah yang bisa mereka gunakan untuk berdagang.

2) Penguatan Organisasi Adaptif

Penguatan organisasi Adaptif yaitu sebuah proses untuk melakukan suatu gerakan pemerintah, perubahan multi level pemerintah yang ada dalam individu, kelompok, organisasi maupun sistem-sistem dalam rangka agar memperkuat kemampuan individu dan organisasi dan lebih mudah mendapat tanggapan perubahan lingkungan. Namun demikian, dalam pengembangan tata kelola yang baik (*good governance*) dapat diadaptasi untuk menyusun organisasi pemerintahan. Misalnya, diperlukan cara pengorganisasian yang lebih fleksibel, dan dibentuk dengan baik yang memberikan *check and balances*, selalu dibuka kemungkinan mekanisme umpan balik yang efektif dan sebagainya.

Tabel. 4.4 Penguatan Organisasi adaptif

NO	INFORMAN	KOORDINASI	AKTIVITAS ORGANISASI
1	Dinas Perdagangan	Dinas Perhubungan, Dinas Kebersihan, Satpol PP, Lurah dan pedagang kaki lima	Relokasi, Memantau pedagang kaki lima, Bekerjasama dengan Instansi
2	Dinas Perhubungan	Dinas Perdagangan	Memantau Perparkiran pelanggan pedagang kaki lima

3	Dinas Kebersihan	Dinas Perdagangan	Memantau Kebersihan Para pedagang kaki lima
4	Satpol PP	Dinas Perdagangan	Mengatur stand pedagang kaki lima
5	Lurah Binanga	Dinas Perdagangan	Mengontrol pedagang kaki lima
6	Pedagang kaki lima	Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, Dinas Kebersihan, Satpol PP, dan Lurah	Berdagang

Sumber: Reduksi Data, 2019.

Dari tabel diatas penelitian menunjukkan Penguatan organisasi pemerintahan Adaptif dilihat dalam Koordinasi sebagian besar instansi melakukannya dengan dinas perdagangan. Dan dilihat dari Aktifitas organisasi itu berbeda-beda di setiap instansi, aktifitas organisasi dinas Perdagangan yaitu Relokasi, Memantau pedangang kaki lima dan tetap menjalin koordinasi dengan intansi yang berkaitan dengan pedagang kaki lima. Aktifitas organisasi dinas perhubungan yaitu memantau tempat parkir pelanggan yang membeli dagangan para pedangang kaki lima. Aktifitas organisasi dinas Kebersihan yaitu memantau kebersihan para pedangang kaki lima. Aktifitas organisasi Satpol PP yaitu mengatur stand para pedangang kaki lima. Aktifitas organisasi Kelurahan binanga yaitu memantau pedangang kaki lima dan aktifitas organisasi pedangang kaki lima yaitu berdagang dan mengikuti aturan yang telah disepakati. Dalam teori Grindle mengatakan bahwa Penguatan organisasi pemerintahan Adaptif yaitu sebuah proses untuk melakukan suatu gerakan pemerintah,

perubahan multi level pemerintah yang ada dalam individu, kelompok, organisasi maupun sistem-sistem dalam rangka agar memperkuat kemampuan individu dan organisasi lebih mudah mendapat tanggapan perubahan lingkungan. Hal ini bisa dilihat dari wawancara :

a. Koordinasi

Koordinasi adalah kegiatan yang dikerjakan oleh banyak pihak dari satu organisasi yang sederajat untuk mencapai suatu tujuan bersama dengan kesepakatan masing-masing pihak agar tidak terjadi kesalahan dalam bekerja. Mengenai koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan berikut hasil wawancara penulis dengan Kepala bidang penguatan dan Pegawai sarana distribusi perdagangan dinas perdagangan sebagai berikut :

“Sudah jelas kami lakukan Koordinasi dengan instansi yang berhubungan juga dengan pedagang kaki lima. Ada perwakilan dari kantor kami untuk selalu berkoordinasi dengan instansi yang bekerjasama untuk pemberdayaan pedagang kaki lima. Kami paling sering berkoordinasi langsung dengan Lurah, Dinas perhubungan, Dinas kebersihan, dan Satpol pp kabupaten Mamuju terkait permasalahan yang ada. Contohnya, kalau masalah perparkiran untuk para pedagang kaki lima kami langsung koordinasikan dengan dinas perdagangan. Jadi apapun masalah yang ada kami koordinasikan sesuai dengan instansi yang berkaitan dengan masalah yang terjadi dilapangan”. (Wawancara dengan bapak TS, 1 Juli 2019).

Hal serupa juga dikemukakan oleh Sekretaris Dinas Perdagangan yang mengatakan bahwa :

“Ya, koordinasi pasti sering kita lakukan, entah itu berkoordinasi dengan instansi-instansi yang terkait dengan pedagang kaki lima maupun berkoordinasi dengan para pedagang kaki lima langsung. Pentingnya juga melakukan koordinasi agar kami mengetahui apa saja masalah yang terjadi

dilapangan dan insyaallah kami akan memberikan bantuan ketika para pedangang kaki lima membutuhkan bantuan ataupun ada kendala yang mereka tidak bisa atasi”. (Wawancara dengan bapak OT, 4 Juli 2019).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, menjelaskan bahwa dinas Perdagangan melakukan Koordinasi dibeberapa instansi yaitu, dinas Kebersihan, dinas Perhubungan, Satpol PP, dan Kelurahan begitupun dengan pedangang kaki lima agar mempermudah dinas Perdagangan mengetahui kekurangan ataupun kendala yang di alami pedangang kaki lima. Dengan melakukan koordinasi juga dapat meningkatkan jalinan kerjasama semakin erat.

b. Aktifitas Organisasi

Aktifitas organisasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan organisasi maupun instansi yang berbeda-beda. Mengenai Aktifitas organisasi yang dilakukan oleh dinas Perdagangan berikut hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang penguatan dan pegawai sarana distribusi Perdagangan Dinas Perdagangan sebagai berikut :

“Aktifitas yang dilakukan dikantor dinas Perdagangan yaitu relokasi, Memantau pedangang kaki lima, Bekerjasama dengan instansi, juga setiap instansi itu berbeda-beda untuk hal Aktifitas organisasinya. Kelurahan itu memantau setiap bulan pedangang kaki lima, dinas kebersihan memantau kebersihan lingkungan dan tempat berdagang, Satpol PP mengatur stand, dan dinas Perhubungan mengatur tempat parkir para pedangang kaki lima agar tersusun rapi dan tidak membuat macet jalanan. Untuk pedangang kaki lima sendiri yah berdagang dan mengikuti aturan yang telah diberitahukan dan sudah disetujui”. (Wawancara bersama bapak TS, 1 Juli 2019).

Hal serupa juga dikemukakan oleh Sekretaris Dinas Perdagangan

yang mengatakan bahwa :

“Aktifitas yaitu bekerjasama dengan instansi dan memantau pedagang kaki lima. Intansi yang bekerjasama dengan dinas Perdagangan memiliki aktifitas yang berbeda-beda. Semua tergantung juga dengan pekerjaan masing-masing”. (Wawancara bersama bapak OT, 04 Juli 2019).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, menjelaskan bahwa dinas Perdagangan melakukan Aktifitas organisasi Dinas Perdagangan yaitu memantau pedagang kaki lima dan tetap menjalin koordinasi dengan intansi yang berkaitan dengan pedangang kaki lima. Aktifitas organisasi dinas Perhubungan yaitu memantau tempat parkir pelanggan pedagang kaki lima. Aktifitas organisasi dinas Kebersihan yaitu memantau kebersihan para pedagang kaki lima. Aktifitas organisasi Satpol PP yaitu mengatur stand Para pedagang kaki lima. Aktifitas Organisasi Kelurahan Binanga yaitu memantau pedagang kaki lima dan aktifitas organisai pedagang kaki lima yaitu berdagang dan mengikuti aturan yang telah di setujui.

3) Pembaharuan Institusional Adaptif

Pembaharuan institusional adaptif adalah melakukan perubahan, perbaikan, penataan dan pengaturan secara indepeden sikomprehensif dan sistematis terhadap banyak hal, terutama yang berkaitan dengan pemerintah adaptif, serta sistem bernegara, berorganisasi dan imparsialitas instutional. Ini menggabungkan konsep *Adaptive governance* dengan *capacity building* sehingga lahirlah organisasi adaptif. Konsep inilah yang akan digunakan untuk mengukur pemberdayaan organisasi Adaptif dalam kebijakan pemberdayaan

pedangang kaki lima dalam pengembangan kapasitas pemerintahan adaptif yang terdiri dari, Pengembangan sumber daya manusia adaptif, penguatan organisasi adaptif, dan Reformasi Instutional Adaptif untuk mencari dalam kinerja pemerintahan Adaptif. Pembaharuan institusional artinya adalah adanya lembaga yang akan membuat suatu program dimana dinas Perdagangan ataupun instansi lain dapat membuat suatu kegiatan yang menyangkut pedagang kaki lima. Dapat dilihat wawancara setiap instansi pada tabel dibawah ini:



Tabel. 4.5 Pembaharuan Institusional

NO	INFORMAN	EKONOMI	POLITIK	SOSIAL
1	Dinas Perdagangan	Membuat program bantuan payung seragam dan gerobak	Tidak ada	Melaksanakan sosialisasi hidup sehat untuk PKL dengan mencuci tangan
2	Dinas Perhubungan	Tidak ada	Memberikan karcis pembayaran	Melakukan sosialisasi untuk PKL mengetahui aturan perparkiran
3	Dinas Kebersihan	Memberi 1 Tempat sampah besar beserta kantong sampah setiap masing-masing PKL	Tidak ada	Melakukan bakti sosial bersama PKL upaya penghijauan di wilayah PKL berdagang
4	Satpol PP	Tidak ada	Tidak ada	Membantu memperbaiki stand -stand para PKL
5	Lurah Binanga	Memberikan bantuan kursi plastik dan meja	Tidak ada	Sosialisasi kewirausahaan bersama para PKL
6	Pedagang kaki lima	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Sumber : Reduksi Data, 2019.

Dari hasil wawancara diatas dapat di simpulkan bahwa Pembaharuan institusional pemerintahan adaptif dapat dilihat pada kantor Dinas perdagangan dari segi ekonominya yaitu dinas Perdagangan telah membuat program bantuan pembagian payung seragam dan gerobak, segi politik menjelaskan bahwa dinas perdagangan tidak melakukan kegiatan apapun yang menyangkut politik di pedagang kaki lima, dan dari segi sosial dinas perdagangan melakukan sosialisasi untuk pedagang kaki lima tentang betapa pentingnya mencuci tangan agar hidup sehat. Meskipun dari

segi politiknya mengatakan tidak ada namun dinas perdagangan tetap melakukan kegiatan ekonomi maupun sosial terhadap para pedagang kaki lima. Menurut pedagang kaki lima program yang dilakukan dinas Perdagangan sangat bagus dan membantu mereka, baik dalam segi pembagian payung seragam dan gerobak maupun mengikuti sosialisasi tentang pentingnya mencuci tangan agar hidup sehat. Berikut Hasil wawancara oleh dinas perhubungan, dapat dilihat dari segi ekonomi yang mengatakan bahwa tidak ada kegiatan ekonomi dari dinas perhubungan kepada para pedagang kaki lima, dari segi politiknya mengatakan bahwa dinas Perhubungan memberikan tiket parkir kepada para pedagang kaki lima disetiap sore pada saat mereka memulai berdagang sampai tutup, dan dari segi sosial mengatakan bahwa dinas Perhubungan melakukan sosialisasi tentang aturan perparkiran yang benar agar pedagang kaki lima dapat mengetahui aturan-aturan perparkiran dimanapun mereka berada. Meskipun dinas Perhubungan tidak melakukan program kegiatan ekonomi namun tetap melakukannya di politik dan sosial.

Dari kantor dinas kebersihan dapat dilihat dari segi ekonominya yang mengatakan bahwa dinas kebersihan telah memberikan tempat sampah besar beserta dengan kantong sampah untuk setiap 1 (satu) orang para pedagang kaki lima, dari segi politik mengatakan bahwa dinas kebersihan tidak melakukan kegiatan apapun tentang politik di pedagang kaki lima, dan segi sosial mengatakan bahwa dinas kebersihan melakukan bakti sosial dengan mengajak para pedagang kaki lima membersihkan

sekitaran wilayah mereka berdagang. Meskipun dinas Kebersihan tidak melakukan kegiatan politik di pedagang kaki lima namun dinas kebersihan tetap melakukannya di kegiatan ekonomi dan sosialnya. Hasil wawancara Satpol PP dapat dilihat dari segi ekonomi dan politik yang mengatakan tidak ada kegiatan maupun Program yang dilakukan, tetapi dari segi sosial Satpol PP melakukan bantuan memperbaiki stand-stand para pedagang kaki lima jika ada kerusakan ataupun masalah yang terjadi di lokasi. Dan Hasil wawancara lurah binanga dapat dilihat dari segi ekonominya yaitu memberikan bantuan kursi plastik dan meja plastik, dari segi politik mengatakan bahwa lurah binanga tidak melakukan kegiatan politik apapun kepada para pedagang kaki lima, tetapi dari segi sosial lurah Binanga melakukan sosialisasi tentang kewirausahaan. Meskipun lurah Binanga tidak melakukan kegiatan apapun pada politik namun lurah binanga tetap melakukan kegiatan ekonomi dan Sosialnya untuk para pedagang kaki lima. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti oleh pedagang kaki lima bahwa dari segi ekonomi, politik dan sosial para pedagang kaki lima tidak melakukan apapun untuk pembaharuan institusionalnya karena menyangkut tentang lembaga/instansi. Pembaharuan institusional artinya adalah adanya lembaga yang akan membuat suatu program dimana dinas Perdagangan ataupun instansi lain dapat membuat suatu kegiatan yang menyangkut dengan pedagang kaki lima. Berikut hasil wawancara Kepala Bidang dinas penguatan dan Pegawai sarana distribusi perdagangan Dinas Perdagangan:

“Kami melakukan Pembaharuan institusional hanya dari segi ekonomi dan sosial. karena dari segi politik kami tidak menyangkut pautkan antara politik dan pedagang kaki lima. Kami menyangkutkan pedagang kaki lima untuk yang menyangkut dengan mereka saja seperti ekonomi maupun sosialnya. Segi ekonomi kami memberikan bantuan payung seragam dan gerobak di setiap para pedagang kaki lima. Kalau dari segi sosial kami memberikan sosialisasi tentang betapa pentingnya mencuci tangan untuk kesehatan diri sendiri maupun masyarakat, apalagi pedagang kaki lima harus mencuci tangan agar makanan atau minuman yang mereka jual higienis dan bersih”. (wawancara bersama bapak TS, 1 Juli 2019).

Hasil wawancara berbeda pada kepala seksi perparkiran Pada

Bidang lalu lintas dinas Perhubungan kabupaten Mamuju yang mengatakan bahwa :

“Pembaharuan Institusional dari segi ekonomi kami tidak melakukan apapun, dari segi politik kami melakukan pembagian tiket parker setiap mereka memulai berjualan. Kami membagikan karcis sebagai tindakan pengamanan agar tidak terjadi pencurian kendaraan ditempat parkir. Memiliki tiket parker adalah bukti bahwa anda yang pemilik kendaraan tersebut. Dari segi sosialnya kami melakukan sosialisasi terhadap pedagang kaki lima tentang pentingnya mengetahui aturan-aturan perparkiran kendaraan yang baik”. (wawancara bersama bapak SB, 5 Juli 2019).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa dinas perdagangan telah melakukan pembaharuan institusional dari segi ekonomi dan sosialnya. Dinas perdagangan tidak melakukan Pembaharuan institusional segi politik karena menurut mereka pedagang kaki lima dan politik sama sekali tidak ada sangkut pautnya. Tetapi beda hal dengan dinas Perhubungan yang mengatakan bahwa pembaharuan Institusional dari segi Politik mengatakan adanya itu dengan cara memberikan tiket parkir yang dimana tiket parker berasal dari pemerintah dengan membayar dua ribu rupiah (Rp.2000), tetapi mereka mengatakan

bahwa sangat penting pembagian tiket parker untuk pedagang kaki lima agar dapat menjaga atau mengetahui bahwa motor tersebut benar motor pelanggannya ketika memperlihatkan tiket parkir tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengembangan kapasitas kelembagaan dan faktor pendukung serta mengetahui penghambat yang banyak dihadapi dalam pengembangan pedagang kaki lima. Hasil penelitian diatas dapat dilihat bahwa aktivitas sumber daya manusia adaptif dilakukan didalam organisasi, dengan kata lain tidak akan terjadi suatu proses pelatihan atau pengembangan dalam hal apapun tanpa upaya pengembangan kapasitas bagi pelaku maupun juga sistem yang telah mengaturnya. Pentingnya pemerintah daerah adalah agar dapat meningkatkan performa aparatur yang ada dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi daerah dan regulasi kebijakan pemerintah daerah yang dijalankan. Penelitian yang dilakukan di kabupaten Mamuju menggunakan konsep *Adaptive governance* mendapatkan hasil bahwa sudah dilakukan oleh pemerintah setempat khususnya dinas Perdagangan yang langsung mengambil alih para pedagang kaki lima. Dinas perdagangan memiliki kapasitas untuk diterapkannya *adaptive governance*, dinas perdagangan dan instansi yang sudah bekerja sama tetap menjalankan tugasnya meskipun ada beberapa instansi yang tidak menjalankan tugas sesuai indikator peneliti, diluar indikator peneliti instansi yang lain tetap menjalankan tugasnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian yang Mengenai *Adaptive Governance* dalam pengembangan Kapasitas Pemerintahan daerah dalam Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Mamuju, maka berdasarkan peran pemerintah dapat ditarik beberapa kesimpulan dalam mengukur faktor yang mempengaruhi dengan menggunakan teori *Capacity Building* menurut Model Grindle 1997 dan konsep *Adaptive Governance* yaitu:

1. Pengembangan sumber daya manusia Adaptif

Pengembangan sumber daya manusia memiliki 3 (tiga) sub Indikator yaitu : training, rekrutmen dan teknis. Dalam segi training yaitu melakukan pelatihan kewirausahaan, pelatihan ini diikuti oleh pegawai serta pedagang kaki lima. Dinas perdagangan mengikutkan pegawai agar para pegawai mampu mengetahui kewirausahaan dan bisa untuk disalurkan ke pedagang kaki lima yang baru ataupun dengan pedagang kaki lima yang lama. Dalam segi rekrutmen para pedagang kaki lima mengambil formulir pendaftaran itu hanya di kantor Dinas Perdagangan. Segi rekrutmen pedagang kaki lima dengan memanggil rekan yang ingin mengambil formulir dan mendatangi kantor Dinas Perdagangan dan dari segi teknis pedagang kaki lima mengikuti semua perlombaan yang di adakan setiap instansi, menurut mereka perlombaan paling mereka sukai jika adanya hadiah yang bisa mereka gunakan untuk berdagang.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, menjelaskan dari segi teknis Dinas kebersihan melakukan perlombaan kebersihan untuk para pedagang kaki lima di sekitaran stand berdagang mereka dan yang paling bersihakan mendapatkan hadiah dari dinas kebersihan, itu sangat membuat para pedagang kaki lima semangat melakukan perlombaan itu karena mendapat *reward*. Nyatanya benar bahwa aktivitas teknis yang dilakukan dinas kebersihan berdampak positif, karena tidak hanya bersih tetapi lingkungan dan jalan terlihat rapih dan sudah tidak ada lagi sampah yang berserakan di jalan. dan dari segi Teknis pedagang kaki lima mengikuti semua perlombaan yang di adakan setiap instansi, menurut mereka perlombaan paling mereka sukai jika adanya hadiah yang bisa mereka gunakan untuk berdagang.

2. Penguatan Organisasi Adaptif

Penguatan organisasi adaptif memiliki 2 (dua) sub. Indikator yaitu: Koordinasi dan Aktivitas organisasi. Dilihat dari Dinas Perdagangan melakukan Koordinasi di beberapa instansi yaitu, Dinas Kebersihan, Dinas Perhubungan, Satpol PP dan Kelurahan begitupun dengan pedagang kaki lima agar mempermudah Dinas Perdagangan mengetahui kekurangan ataupun kendala yang di alami pedagang kaki lima. Dengan melakukan koordinasi juga dapat meningkatkan jalinan kerjasama semakin erat. Dari segi Aktivitas organisasi menjelaskan bahwa Dinas Perdagangan melakukan Aktifitas Organisasi Dinas Perdagangan yaitu memantau pedagang kaki lima dan tetap menjalin koordinasi dengan instansi yang berkaitan dengan pedagang kaki lima. Aktifitas Organisasi Dinas

Perdagangan yaitu memantau tempat parkir pelanggan pedagang kaki lima.

3. Pembaharuan Institusional Adaptif

Pembaharuan Institusional Adaptif memiliki 3 (tiga) sub Indikator yaitu: Ekonomi, Politik, dan Sosial. Dari segi ekonominya yaitu Dinas Perdagangan telah membuat program bantuan pembagian payung seragam dan gerobak, segi politik menjelaskan bahwa dinas perdagangan tidak melakukan kegiatan apapun yang menyangkut politik di pedagang kaki lima, dan darisegi sosial Dinas perdagangan melakukan sosialisasi untuk pedagang kaki lima tentang betapa pentingnya mencuci tangan agar hidup sehat. Meskipun dari segi politiknya mengatakan tidak ada namun Dinas perdagangan tetap melakukan kegiatan Ekonomi maupun Sosial terhadap pedagang kaki lima.

B. SARAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang berjudul “*Adaptive Governance* dalam Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Mamuju” ini, maka peneliti dapat memberikan saran agar dapat melaksanakan peran pemerintah terhadap pedagang kaki lima sehingga berjalan dengan semestinya. Adapun saran-saran sebagai berikut yaitu :

1. Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju

- a. Selain gerobak dan payung yang telah diberikan diharapkan Pemerintah dapat memberikan tambahan bantuan fasilitas umum berupa kursi seragam untuk berjualan para pedagang kaki lima. Agar sepanjang jalan Anjungan pantai manakarra tempat para pedagang kaki lima berdagang terlihat rapi, bersih dan indah bila dipandang.
- b. Diharapkan Pemerintah lebih sering melakukan pembinaan terhadap para pedagang kaki lima berupa sosialisasi kewirausahaan atau pelatihan-pelatihan tentang pedagang kaki lima.

2. Pedagang kaki lima

- a. Para pedagang kaki lima seharusnya melaksanakan kewajiban dan hak secara seimbang agar terciptanya keindahan dan menciptakan rasa nyaman bagi semua pihak.
- b. Pedagang kaki lima tidak lagi mengganggu ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat. Untuk para pedagang kaki lima yang belum membuat surat izin usaha agar segera membuat secepatnya, jika tidak pedagang kaki lima akan mendapatkan penertiban dan gusuran dari Satpol PP kabupaten Mamuju.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, & Kasmad, R. (2018). *Jaringan kolaboratif lokal: apakah pelaksana cerdas kebijakan pengembangan bisnis kakao di Indonesia?*. Jurnal Internasional Kebijakan Publik, 14(5-6), 374-390.
- C, Folke, dkk. (2005). Tata kelola adaptif dari sistem sosial-ekologis. Annu. Rev. Environ. Sumber daya, 30, 441-473.
- C, Hudson, dkk (2004). *Operasi kelenjar getah bening femoralis: apakah tidak adekuat atau berlebihan?*. Jurnal Internasional Kanker Ginekologi, 14(5), 841-845.
- Engle, N. L. (2011). *Kapasitas adaptif dan penilaiannya*. Perubahan lingkungan global, 21(2), 647-656.
- Farmer, E., & Weston, K. M. (2002). *Model konseptual untuk pengembangan kapasitas dalam penelitian perawatan kesehatan primer Australia*. Dokter keluarga Australia, 31(12), 1139.
- Fischhendler, I., & Heikkila, T. (2007, November). *IWRM mendukung tata kelola adaptif: Suatu perspektif kebijakan*. Dalam konferensi akhir *Freude am Fluss*, Universitas Radboud, Nijmegen (NL) (pp. 22-24).
- Hatfield-Dodds, dkk. (2007). *Pemerintahan adaptif: Pengantar dan implikasi untuk kebijakan publik*. (No. 418-2016-26492).
- Hilderbrand, dkk. (1997). *Mendapatkan pemerintahan yang baik: peningkatan kapasitas di sektor publik di negara berkembang*, 504.

- Imperial, M. T. (2005). *Menggunakan kolaborasi sebagai strategi tata kelola: Pelajaran dari enam program pengelolaan daerah aliran sungai. Administrasi & Masyarakat*, 37(3), 281-320.
- James, V. U. (Ed.). (1998). *Pengembangan kapasitas di negara berkembang: Dimensi manusia dan lingkungan*. Grup Penerbitan Greenwood.
- Kasmad, R., & Alwi, A. (2015). *Model Demokratis Akuntabilitas Kebijakan Publik. Studi Kasus tentang Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar*. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 6(2), 186-202.
- McGinnis, M. D. (2011). *Jaringan situasi aksi yang berdekatan dalam pemerintahan polisentris*. *Jurnal Studi Kebijakan*, 39(1), 51-78.
- R. Nelson, dkk (2008). *Menggunakan pemerintahan adaptif untuk memikirkan kembali cara sains mendukung kebijakan kekeringan Australia*. *ilmu & kebijakan lingkungan*, 11(7), 588-601.
- Suharto, E. (2008). *Pendampingan sosial dalam pemberdayaan masyarakat miskin: Konsepsi dan strategi*. *Jurnal studi Pemerintahan*.
- Utami, T. (2014). *Pemberdayaan Komunitas Sektor Informal Pedagang Kaki Lima (PKL), Suatu Alternatif Penanggulangan Kemiskinan*. *Jurnal Sosiologi DILEMA*, 25(2).



1. Wawancara Bersama Sekretaris Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju



2. Wawancara bersama Kepala Bidang Penguatan dan Pegawai Sarana
Distribusi Perdagangan Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju



3. Wawancara bersama Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Mamuju





4. Wawancara Bersama dengan Lurah Binanga Kabupaten Mamuju



5. Wawancara bersama Kepala Seksi Perparkiran Pada Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju



6. Wawancara bersama Kepala Seksi Pelayanan dan Pengaduan Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Mamuju



7. Wawancara bersama salah satu perwakilan Pedagang Kaki Lima (PKL)



BIODATA PENELITI



NURATHIRAH APRILLAH NORMAN dilahirkan di kabupaten Majene pada hari sabtu tanggal 26 April 1997 anak ketiga dari 5 (lima) bersaudara pasangan dari bapak Norman Rasyid, SE dan Rubia, SE. Peneliti mempunyai 4 (empat) saudara kandung, kakak bernama Muh. Aidhir Norman, SE dan Nurul Nisyah Norman. adek bernama Muh. Acho Qibran Norman dan Chici Kirani Norman. Peneliti menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) di Inpres Rimuku kabupaten Mamuju dan Lulus pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Negeri 2 kabupaten Mamuju dan lulus pada tahun 2012 kemudian peneliti melanjutkan pendidikan ketahap Sekolah Menengah Atas (SMA) di Negeri 1 Kabupaten Mamuju dengan Jurusan yang di ambil peneliti Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan lulus pada tahun 2015. Tahun 2015 peneliti melanjutkan pendidikan di Perguruan tinggi, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar pada program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Dengan ketekunan hingga motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, peneliti telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugasakhir Skripsi ini. Semoga dengan penelitian tugas akhir Skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan khususnya dalam pengembangan disiplin Ilmu Administrasi Negara. Akhir kata peneliti mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya Skripsi yang berjudul “*Adaptive Governance* dalam Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Pedagang kaki Lima (PKL) di Kabupaten Mamuju”.

RIWAYAT HIDUP



Nama : Nurathirah Aprillah Norman
Nim : 105610554315
Tempat tanggal Lahir : Majene, 26 April 1997
Alamat : Talasalapang V, No.1
No. Hp : 081354745625
Nama Orang tua
Ayah : Norman Rasyid, SE
Ibu : Rubia, SE

Anak dari pasangan Norman Rasyid dan Rubia yang telah Menyelesaikan Studinya pada:

- ❖ SD Inpres Rimuku Mamuju pada Tahun 2003-2009
- ❖ SMPN 2 Mamuju pada Tahun 2009-2012
- ❖ SMAN 1 Mamuju pada Tahun 2012-2015
- ❖ Strata 1 Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2015 - sekarang pada jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik